

Milik Depdiknas
Tidak diperdagangkan

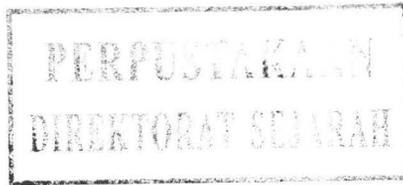


SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2001

Milik Depdiknas
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2001

PERPUSTAKAAN	
DIP & TITIK BUKU	
Nomor buku	: 1272/2002
Tanggal	: 02 12 2002
Tanggal	: 02 12 2002
Sub judul	: HABISAT
Nomor buku	:
Kopik	: 2

SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON

Penulis : Drs. M. Sanggupri Bochari
Dra. Wiwi Kuswiah

Penyunting : Dra. G. A. Ohorella

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta 2001

Edisi I

Dicetak oleh : CV. SUKO REJO BERSINAR

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek PKSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek PKS N sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami
sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2001

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP 130353848

PENGANTAR

Buku *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian penulisan yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2000/2001.

Penulisan Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon ini merupakan salah satu bagian dari penulisan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia yang dilakukan Proyek PKSN secara bertahap.

Buku ini memuat ikhwal sejarah kerajaan Tradisional Cirebon dalam berbagai aspek. Diantaranya tentang sejarah, geografis, penduduk, budaya, pelapisan sosial, berkembangnya Islam di Cirebon, Peranan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam, Kesultanan Cirebon pada masa Kolonial Belanda, Cirebon sebagai Bandar Dagang dan Reaksi terhadap kekuasaan Belanda.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat, dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, September 2001

**Pemimpin Proyek Peningkatan
Kesadaran Sejarah Nasional**



Wiwi Kuswiah
NIP 131125902

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.5 Ruang Lingkup dan Kerangka Penulisan	3
BAB II CIREBON SELAYANG PANDANG	
2.1 Letak Geografis	5
2.2 Penduduk dan Budaya	7
2.3 Pelapisan Sosial	10
BAB III DINAMIKA KEHIDUPAN AGAMA DAN PERANAN PANGGURON GUNUNG JATI	
3.1 Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Cirebon	17

3.2	Peranan Pangguron Gunung Jati dalam Penyebaran Ajaran Islam di Cirebon	15
BAB IV KERAJAAN CIREBON PADA ABAD XVII - XIX		
4.1	Kesultanan Cirebon pada Masa Kolonial Belanda	33
4.2	Cirebon Sebagai Bandar Dagang	38
4.3	Reaksi Terhadap Kekuasaan Belanda	47
BAB V PENUTUP		57
KEPUSTAKAAN		61
LAMPIRAN		63
PETA		64
FOTO		75

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memahami sejarah Indonesia yang mencakup rentang waktu yang panjang dan berdimensi luas, adalah baik bila disederhanakan menjadi dua masa perkembangan: Pertama, masa kerajaan tradisional, kedua, masa kolonial. Pembagian kedua masa itu bukanlah masa pembabakan yang ketat, sebab perkembangan itu di dalam prosesnya dapat berjalan bersamaan atau bahkan tumpang tindih. Tulisan yang akan disusun ini mengambil satu dari dua masa itu, yaitu masa kerajaan tradisional, dengan pusat perhatian pada Kerajaan Tradisional Cirebon.

Pengertian tradisional dalam masa kerajaan tradisional dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada ciri-ciri lokal yang telah lama berakar pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada umumnya unsur integratif yang ada pada kerajaan tradisional tersebut adalah faktor agama Hindu, Budha, dan Islam. Dalam perkembangan ini kerajaan-kerajaan di Nusantara memperlihatkan prosesnya sendiri yang kemudian lebih bercorak nusantara daripada bercorak India atau Arab sesuai dengan pengaruh dari ajaran agama masing-masing. Kerajaan tradisional tersebut ada yang bercorak agraris dan ada yang bercorak maritim, atau bahkan

campuran dari keduanya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis dari masing-masing kerajaan.

Cirebon atau yang kemudian dikenal pula dengan julukan “Kota Ugang” merupakan satu di antara beberapa daerah di Indonesia yang menyimpan begitu banyak peristiwa bersejarah dan peninggalan sejarah. Hal ini dapat terlihat dari adanya peninggalan berupa: kompleks kraton dan kompleks makam/kuburan bercorak Islam dari keluarga sultan-sultan Cirebon. Selain itu, juga terdapat karya tulis berupa naskah (babad) dan tradisi lisan yang menjadi sumber penulisan tentang sejarah Cirebon.

Peninggalan kraton, menjadi acuan bahwa di Cirebon pernah berdiri sebuah kerajaan. Sedangkan terdapatnya kompleks makam sultan dan keluarganya yang bercorak Islam, menunjukkan bahwa kerajaan yang pernah ada tersebut dipengaruhi oleh agama Islam. Dari berbagai peninggalan tersebut, tergambar bahwa Cirebon menyimpan kisah yang panjang, melintasi kurun waktu beberapa abad lamanya.

1.2 Permasalahan

Untuk menelusuri sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon tersebut, terasa perlu adanya upaya yang terus menerus untuk mengungkap proses tumbuh dan berkembangnya kerajaan tersebut. Tetapi karena waktu yang terbatas, tulisan ini mencoba mengungkap secara umum Kerajaan Tradisional Cirebon pada masa masuk dan berkembangnya agama Islam. Masa ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa pengaruh agama Islam mewarnai proses perkembangan kerajaan bercorak Islam di Cirebon. Pengaruh ini terutama terlihat dari begitu banyaknya pengikut yang ada ketika Sunan Gunung Jati memimpin Kerajaan di Cirebon. Selain itu, masa masuknya pengaruh kolonialisme Belanda juga diungkapkan secara umum sampai ke awal abad ke-20.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan bentuk dan corak kerajaan tradisional Cirebon dan memberikan uraian mengenai kemampuan menjawab persoalan-persoalan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan ini terutama dilihat pada masa masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Cirebon dan pengaruh kolonialisme Belanda.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan naskah ini menggunakan metode penulisan sejarah yang meliputi tahap *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*. Pada tahap *heuristik* pencarian dan penghimpunan sumber-sumber sejarah dilakukan terutama melalui studi pustaka. Pada tahap ini berbagai buku, artikel dalam jurnal ilmiah, maupun publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam di Cirebon, dikumpulkan guna menemukan data-data yang relevan. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap *kritik*, data-data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu data tekstual dan data historis, data ekologis atau data lingkungan, serta data etnografis yang berkaitan dengan toponimi, dan tradisi lama yang sampai saat ini masih berlangsung. Selanjutnya dilakukan analisis kritis yang berkaitan dengan Kerajaan Tradisional di Cirebon. Tahap selanjutnya yaitu tahap *interpretasi* atau penafsiran, data-data yang telah diolah dan dianalisis kemudian dipahami sesuai dengan pandangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan. Setelah tahap ketiga ini, tahap berikutnya adalah melakukan proses penulisan kisah sejarah (*historiografi*) Kerajaan Tradisional Cirebon.

1.5 Ruang Lingkup dan Kerangka Penulisan

Untuk tidak melebarkan penulisan pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah yang ditulis, maka perlu dilakukan pembatasan penulisan berdasarkan: ruang lingkup penulisan *temporal* (waktu) dan *spacial* (tempat). Secara temporal penulisan

ini mengambil kurun waktu periode kerajaan tradisional Cirebon pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Sedangkan secara spacial dibatasi pada geografis Cirebon pada masa itu yang tentu saja berbeda setelah masa Kemerdekaan Republik Indonesia hingga kini.

1.6 Kerangka Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode dan ruang lingkup penulisan.

BAB II CIREBON SELAYANG PANDANG

Berisi gambaran umum lokasi Kerajaan Cirebon, letak geografis, penduduk, struktur masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi: golongan raja, elit, non-elit, dan budak-budak.

BAB III DINAMIKA KEHIDUPAN AGAMA, POLITIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Berisi proses masuk dan berkembangnya Islam di Cirebon, dinamika Kerajaan Islam di Cirebon, serta peran Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran Islam di Cirebon.

BAB IV KERAJAAN CIREBON PADA ABAD XVII - XIX

Berisi campur tangan Pemerintahan Kolonial Belanda di Cirebon, reaksi kerajaan terhadap kekuasaan Kolonial Belanda, serta keadaan perekonomian dan perdagangan pada masa itu.

BAB V PENUTUP

Berisi sejarah Cirebon pada awal abad ke-20 dan pada menjelang kemerdekaan, dengan demikian mengemukakan arti dan peranan Kerajaan Cirebon dalam lembaran sejarah nasional Indonesia.

BAB II

CIREBON SELAYANG PANDANG

2.1 Letak Geografis

Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini yang disebut daerah Cirebon adalah wilayah bekas Karesidenan Cirebon terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kotamadya Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Luas kelima daerah ini adalah 5.642,569 km². Batas-batas wilayahnya adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Ibukotanya adalah Cirebon.

Menurut pakar purbakala, daerah pegunungan dari Kuningan ke selatan dan ke barat dapat dianggap daerah yang tertua. Di sini permukiman manusia purba pernah ditemukan. Adapun daerah yang berupa dataran dapat ditemukan di Indramayu di sebelah utara dan Losari di sebelah timur. Dataran ini terbentuk oleh endapan pasir yang bercampur tanah liat yang dialirkan oleh

Sungai Cimanuk dan Sungai Cilosari. Kedua sungai ini berhulu di pegunungan dan mengalir ke utara. Sedangkan Sungai Citanduy mengalir ke selatan, serta merupakan batas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah yaitu: daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman disebut juga dengan nama Cirebon Girang. Ki Gendeng Jumajan Jati menjadi penguasa daerah di sepanjang pesisir pantai Cirebon (Cirebon Larang). Daerah pesisir ini meliputi daerah Singapura dan Pelabuhan Muara Jati. Adapun daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Ciremai atau disebut pula dengan nama Cirebon Girang, dikuasai oleh Ki Gendeng Kasmaya. Daerah ini meliputi seluruh daerah Wanagari. Baik Ki Gendeng Jumajan maupun Ki Gendeng Kasmaya, keduanya adalah saudara Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Pada masa Raja Prabu Niskala Wastukencana berkuasa yaitu sekitar tahun 1371-1475 kedua wilayah Cirebon tersebut berada di bawah kekuasaannya. Kemudian sekitar tahun 1475-1482, kedua wilayah Cirebon itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang (Tohaan) di Galuh.

Cirebon baru menjadi kerajaan Islam yang berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan manapun, ketika Sunan Gunung Jati berkuasa dan melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Raja Kerajaan Sunda Pajajaran ketika itu adalah Sri Paduka (Baduga) Maharaja atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi.

Seiring dengan proses pengislaman yang dijalankan oleh Sunan Gunung Jati, daerah-daerah yang kemudian masuk ke dalam wilayah Kerajaan Cirebon antara lain; Luragung, Kuningan, Banten, Sunda Kelapa, Galuh, Sumedang, Japura Talaga, Losari, dan Pasirluhur. Pangeran Hasanudin, putra Sunan Gunung Jati ditempatkan sebagai Bupati Banten pada tahun 1526. Setahun kemudian Sunan Gunung Jati menempatkan Fatahilah, menantu

Sunan Gunung Jati sebagai Bupati Sunda Kalapa pada tahun 1527. Saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon dibagi atas empat daerah kekuasaan yaitu: Cirebon, Pakwan, Banten, dan Kalapa.

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika Kerajaan Cirebon berada di bawah kekuasaan Panembahan Ratu, daerah Banten berada di bawah kekuasaan Maulana Yusuf, dan wilayah Jawa Barat dibagi atas dua daerah kekuasaan dengan menjadikan Sungai Citarum sebagai garis pemisah. Kedua wilayah itu adalah wilayah Banten berada di sebelah Barat Sungai Citarum, dan wilayah Cirebon berada di sebelah Timur Sungai Citarum.

Pada kurun waktu 1649-1667, Panembahan Girilaya berkuasa. Di bawah kekuasaannya ini wilayah Cirebon meliputi Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Setelah Panembahan Girilaya meninggal dunia Kerajaan Cirebon dibagi menjadi tiga kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Badrudin Kartawijaya, Kesultanan Sepuh dipimpin oleh Samsudin Mertawijaya, dan Kesultanan Kacerbonan dipimpin oleh Pangeran Wangsakarta. Terbaginya Kerajaan Cirebon ke dalam tiga kesultanan ini menyebabkan wilayahnya terbagi pula menjadi tiga wilayah, sesuai dengan kesultanan masing-masing. Selain perubahan wilayah, juga terjadi perubahan yang drastis dalam struktur pemerintahan.

Dalam bukunya “Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon (1479-1809)”, RH. Unang Sunardjo memperkirakan bahwa untuk sementara waktu (1677-1678) pembagian wilayah secara definitif belum dilakukan, sehingga seluruh wilayah Kerajaan Cirebon yang ditinggalkan oleh Panembahan Girilaya dikuasai bersama oleh ketiga putranya, kecuali beberapa tempat tertentu.

2.2 Penduduk dan Budaya

Sebagaimana kehidupan kota-kota pesisir lainnya seperti Jayakarta (Jakarta) dan Demak, kehidupan penduduk di Cirebon tidak berbeda dengan kehidupan penduduk di kota-kota pantai di pesisir utara Pulau Jawa.

Ciri pertama yang menonjol adalah penduduknya yang beraneka ragam. Nama-nama dari kampung mereka diberikan sesuai dengan ciri kehidupan sosial penduduknya. Ada kampung Arab, Kampung Pecinan, Pekojan, dan sebagainya. Pada masa itu Keraton Cirebon adalah pusat dari pemerintahan Kerajaan Cirebon. Istana atau kraton dikelilingi tembok kota. Pemukiman orang asing berada di luar tembok keraton.

Kampung-kampung pada masa itu kerap juga dinamai sesuai jabatan/kedudukan penghuninya. Sebagai contoh ada daerah yang bernama *Ksatriaan, Kauman, atau Kademangan*. *Ksatriaan* adalah perkampungan yang dihuni oleh para prajurit kerajaan. Sedangkan *kauman* dan *kademangan* adalah nama tempat para ulama dan para demang kraton Cirebon. Asal-usul nama perkampungan dapat juga diteliti dari jenis pekerjaan penduduknya. Sebagai contoh sampai sekarang di Cirebon ada kampung yang bernama *panjunan*. Dahulu kampung *panjunan* dikenal sebagai kampung pembuatan gerabah, seperti periuk, belanga, dan lain-lain. Di *Panjunan* ini terkenal seorang tokoh yang bernama Pangeran *Panjunan*.

Pangeran *Panjunan* bukan orang asli Cirebon. Menurut cerita rakyat Cirebon ada seorang putra Sultan Bagdad yang bernama Maulana Abdurrahman yang pergi merantau karena berselisih paham dengan orang tuanya. Dari perantauannya ia sampai ke pantai Cirebon. Maulana Abdurrahman kemudian berguru pada seorang ulama besar bernama Syekh Datuk Kahfi. Setelah selesai memperdalam pengetahuannya dalam bidang keagamaan, ia pergi ke daerah yang sekarang bernama *Panjunan*, yang terletak di sebelah selatan Cirebon. Di tempat ini Maulana Abdurrahman mendirikan mesjid yang terkenal dengan nama Mesjid *Panjunan*.

Satu di antara beberapa tempat yang merupakan tempat bertemu dan berinteraksi penduduk Cirebon adalah pasar. Pasar selain sebagai pusat perputaran ekonomi penduduk, juga sebagai sarana pertukaran budaya dan informasi. Karena fungsi pasar yang penting ini, sehingga biasanya pasar dibangun di dekat alun-alun kraton. Kerumunan penduduk memang terpusat pada pasar-pasar yang tidak setiap hari dibuka. Sedangkan rumah penduduk antara

lain terletak di pantai dan juga di pedalaman. Biasanya para petani bermukim agak jauh dari pantai. Begitu pula berbagai tukang seperti tukang kayu, pandai besi dan lain-lain banyak bermukim di wilayah Cirebon.

Orang Cirebon sering menyebut dirinya sebagai wong Jawa yang membedakannya dengan orang Sunda yang disebutnya wong gunung. Dilihat dari sudut budaya orang Cirebon merupakan pendukung budaya hasil pertemuan kehidupan Sunda dan Jawa. Hal ini dapat dilihat pada bahasanya yang dominan Jawa. Bahasa Cirebon sering disebut dengan nama bahasa Jawa Cirebon atau digolongkan sebagai dialek Jawa – Cirebon sebagai salah satu dialek dari bahasa Jawa. Untuk lebih mudahnya orang kadang-kadang menyebutnya bahasa Cirebon. Bahasa atau dialek Cirebon ini merupakan salah satu bahasa kuna. Dilihat dari segi bahasa di daerah Cirebon dengan ruang lingkup yang luas, orang masih membedakannya antara dialek Kuningan dan dialek Majalengka.

Kekhasan lain dari budaya Cirebon adalah terpadunya unsur budaya Hindu, Cina dan Islam. Budaya dari pengaruh Islam cenderung lebih dominan pengaruhnya. Perpaduan budaya ini tercermin dari arsitektur bangunan, ragam hias, seni tari, dan upacara-upacara. Sebelum kedatangan Islam, budaya Hindu merupakan budaya yang dominan mempengaruhi daerah Jawa Barat. Pengaruh budaya Cina tampak jelas dalam unsur-unsur budaya lama seperti pada ornamen-ornamen dalam kraton, mesjid, motif hiasan Panji, wadas, motif mega pada batik, lambang naga pada kereta pusakan dan sebagainya. Warna-warna ornamennya terang dan berseri seperti warna merah, biru tua dan biru muda, diperkirakan sebagai pengaruh Cina.

Sejak abad ke 15 Cirebon menjadi salah satu pusat penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Kebudayaan Islam ditandai dengan adanya pemerintahan Kesultanan dengan kratonnya dan adanya mejid-mesjid. Dalam perkembangannya kemudian, Cirebon memiliki empat buah kraton, yaitu Kraton Kasepuhan, Kraton Kanoman, Kraton Kacirebonan, dan Kraton Kaprabonan. Kraton-kraton ini masih memberi warna terhadap perkembangan budaya masyarakat sekitarnya bahkan meluas ke daerah sekitarnya.

Masyarakat Cirebon merupakan salah satu masyarakat yang cukup kuat mempertahankan kebudayaannya dari berbagai pengaruh luar, sebaliknya malahan mereka memberi pengaruh kepada daerah-daerah sekitarnya sesuai dengan peranannya sebagai pusat penyebaran budaya Islam sejak berabad-abad sebelumnya. Tersebar dan bertahannya budaya Cirebon ini terlihat dalam hal kesenian dan upacara-upacara. Sebagai contoh kesenian topeng. Kesenian ini pada mulanya merupakan sarana untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kesenian ini bersifat sakral, tetapi kemudian menjadi kesenian rakyat biasa, bahkan sarana untuk mengamen. Kesenian ini pun melebarkan sayapnya ke luar daerah Cirebon sehingga dikenal adanya kesenian topeng Tambun, kesenian topeng Betawi. Sampai sekarang ini kesenian topeng di desa cikal bakalnya yaitu desa Silangit, masih terus tumbuh.

2.3 Pelapisan Sosial

Masyarakat di Kerajaan Cirebon tersusun secara hirarki vertikal pelapisan sosial berdasarkan kedudukan / peran seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Bila dilihat dari segi ini, maka masyarakat di Kerajaan Cirebon dapat dikelompokkan ke dalam empat lapisan sosial, yaitu:

- a. Golongan Raja; terdiri atas raja beserta keluarganya.
- b. Golongan elit
- c. Golongan non-elit
- d. Golongan budak

Golongan raja dan keluarganya ditempatkan pada lapisan atas dari struktur masyarakat Kerajaan Cirebon. Para raja/sultan Cirebon merupakan golongan ningrat yang bertempat tinggal di dalam lingkungan kraton/istana kerajaan. Dari istananya raja menjalankan berbagai kebijaksanaan dan perintahnya. Sebelum masuknya pengaruh Islam dikenal hanya gelar raja, tetapi kemudian berubah menjadi sultan begitu pengaruh Islam masuk dan tertanam dalam kehidupan masyarakatnya. Selain gelar sultan, terdapat gelar lainnya pada golongan ini, yaitu *mangkubumi*, *adipati*, *senapati*, *pangeran*, *susuhunan* dan *panembahan*. Gelar-

gelar ini umumnya diberikan kepada keluarga dekat sultan. Gelar tersebut ada kaitannya dengan status mereka masing-masing dalam kehidupan kemasyarakatan seperti penguasa dalam pemerintahan sehari-hari, pemegang kekuatan bersenjata, pemimpin kerohanian dan sebagainya. Sebagian dari mereka ada yang berasal dari kalangan luar, tetapi hal itu pun sangat jarang, hanya orang yang betul-betul dikenal dan dipercaya oleh sultan/raja.

Satu hal perlu dikemukakan di sini bahwa setelah Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati) tidak memimpin Kerajaan Cirebon lagi, gelar susuhunan, sunan, atau tumenggung, apalagi gelar panetep panata sama rasul, tidak digunakan lagi. Penghentian penggunaan gelar-gelar ini dimaksudkan untuk memberi penghormatan khusus kepada Sunan Gunung Jati yang mendapat hidayah dari Allah untuk menjadi wali dan penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Dengan demikian kewaliannya tidak dapat diteruskan apalagi diwarisi oleh pengganti-penggantinya. Derajat kewalian sangat tinggi dan harus diperoleh melalui berbagai ujian baik yang datang langsung dari Allah maupun dari sidang paripurna para **Wali Sanga** di Pulau Jawa ketika itu.

Raja atau sultan sebagai penguasa tertinggi di kerajaan dan pemerintahannya, memimpin garis hirarki dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, yaitu mangkubumi, menteri, kadi, senapati, syahbandar dan sebagainya. Dalam menyampaikan perintah dan amanatnya secara hirarki juga, biasanya terlebih dahulu disampaikan kepada mangkubumi, sebagai pejabat tertinggi untuk kemudian mangkubumi menjabarkannya lagi dan kemudian disampaikan ke menteri-menteri atau pejabat lainnya secara hirarki melalui prosedur khusus. Para utusan tersebut diharuskan terlebih dahulu menyampaikan maksudnya melalui syahbandar, kemudian diteruskan oleh syahbandar kepada patih, baru kemudian diteruskan ke raja atau sultan. Bilamana raja pada suatu saat berkenan mengadakan perjalanan keliling baik di dalam maupun keluar kota, kebiasaannya menunggang kereta yang ditarik lembu atau kerbau. Ketika iring-iringan perjalanan raja bertemu dengan rakyatnya, rakyat harus minggir dan berjongkok

di tepi jalan sambil menyembah sebagai bentuk penghormatan pada raja.

Dari berbagai hal yang diuraikan tersebut, terlihat bahwa hubungan antara bangsawan, para pejabat kerajaan dan rakyat dengan raja atau sultan sangat dibatasi. Hal ini disebabkan oleh ditempatkannya posisi raja atau sultan pada posisi peraturan-peraturan adat dan ajaran agama. Selain itu juga dari pihak raja yang memegang kekuasaan, mempertahankan wibawa dan kekuasaannya dengan cara membatasi pertemuan dengan bawahan dan rakyatnya sendiri. Hal lain yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah kehidupan social ekonomi antara raja/sultan dengan lapisan social lainnya sangat jauh berbeda, apalagi dengan golongan bawah yaitu rakyat kerajaan.

Dialog atau pertemuan antara raja/sultan dengan para bawahannya tidak terjadi setiap hari. Pertemuan dilakukan bila ada masalah yang terasa segera perlu diselesaikan. Kondisi alam seperti hujan membuat pertemuan jarang dilakukan pada musim hujan. Dalam setiap dialog raja meminta laporan-laporan dari masing-masing bawahannya. Laporan itu menyangkut keadaan daerah masing-masing, perkembangan kehidupan ekonomi rakyat baik di pasar, pertanian, maupun pelabuhan, serta laporan mengenai perkembangan kehidupan sosial, politik, dan hukum di dalam kerajaan. Pada saat dialog atau pertemuan biasanya diikuti pula oleh rakyat, tergantung pada persoalan yang akan dibicarakan.

Kehadiran raja di muka umum biasanya dilakukan pada upacara-upacara kenegaraan seperti penobatan raja, upacara perkawinan raja atau putra-putri raja. Kehadiran para bangsawan, pejabat-pejabat di keraton Cirebon, maupun pejabat-pejabat di daerah, biasanya membawa hadiah-hadiah atau upeti yang dipersembahkan kepada raja. Tindakan bawahan seperti ini dapat menjadi suatu penilaian tersendiri bagi raja terhadap kesetiaan bawahannya.

Upacara penerimaan utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri merupakan prestasi tersendiri, dan hal ini menjadi media “perekat” antara para

raja. Pada masyarakat Jawa Barat umumnya, dan pada masyarakat kerajaan Cirebon khususnya yang corak kesilamannya kental, tertanam anggapan bahwa raja atau sultan bersifat magis-religius. Hal ini terlihat dari pemberian gelar-gelar panembahan, susuhunan, wali, dan sebagainya.

Bagi keluarga raja yang berada dalam kraton tidak begitu mudah untuk berkomunikasi langsung dengan penduduk sekitar kraton. Hal ini disebabkan tembok kompleks kraton dijadikan sebagai simbol pemisah antara raja dan keluarganya dengan penduduk di sekitar pusat kerajaan tersebut.

Menurut Poesponegoro (1990,6) bahwa menurut tradisi kraton, sebagai pengganti raja apabila mangkat, ialah putra laki-laki tertua atau putra satu-satunya dari permaisuri raja (garwa padun atau garwa padmi). Seandainya permaisuri tidak mempunyai putra/anak laki-laki, maka putra tertua dari selir (garwa ampeyan atau garwa ampil) dibolehkan diangkat sebagai pengganti raja. Apabila keduanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja, paman, atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila calon yang berhak tidak memenuhi persyaratan sebagai raja.

Golongan elite merupakan kelompok orang-orang yang mempunyai kedudukan di lapisan atas. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah bangsawan, priyayi, tentara, golongan keagamaan (Islam) dan pedagang kaya. Di antara golongan ini patih dan syahbandar menduduki tempat yang penting. Syahbandar selain berasal dari orang pribumi, juga ada yang berasal dari luar negeri. Seperti syahbandar di Cirebon berasal dari negeri Belanda. Di Banten syahbandarnya berasal dari Cina dan Gujarat, dan syahbandar di Batavia berasal dari Jepang. Dipilihnya syahbandar dari negeri lain, didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai perdagangan dan hubungan internasional. Fungsi syahbandar tidak hanya terbatas pada masalah hubungan dengan orang-orang asing saja, tetapi juga masalah hubungan antara negara yang mencakup semua bentuk kegiatan umum yang bersifat internasional.



Golongan keagamaan yang terdiri dari para ulama menempati posisi yang cukup terpendang pada masyarakat Cirebon. Mereka pada umumnya berperan sebagai penasehat raja. Tidak sedikit pula dari para ulama ini memainkan peran di bidang politik dan budaya. Peran ini diambil karena adanya akses yang luas bagi para ulama untuk dekat dengan kehidupan istana. Begitu kuatnya pengaruh ulama dalam kehidupan politik intern, sehingga sering titah raja disampaikan melalui para ulama. Raja sendiri, seperti pada masa kekuasaan Panembahan Ratu (Sunan Gunung Jati) memerintah Cirebon, disebutkan pada catatan kraton Kasepuhan Cirebon bahwa beliau lebih banyak bertindak dan berperilaku sebagai ulama dari pada sebagai raja. Jadi urusan pengembangan agama lebih diprioritaskan dari pada urusan ekonomi, politik, maupun militer.

Golongan lapisan bawah (Non elite). Golongan ini meliputi jumlah yang sangat banyak, tetapi dari segi kehidupan sehari-hari termasuk kedalam lapisan masyarakat kecil. Pada umumnya mereka bermata-pencarian dari pertanian, pedagang, nelayan, tukang, tentara bawahan, buruh, dan pekerja lain yang masuk ke lapisan masyarakat bawah. Adalah kenyataan bahwa bagaimana pun juga mereka yang tergolong kepada masyarakat lapisan bawah ini (non elite) termasuk petani dan pedagang semata-mata merupakan tulang punggung bagi kehidupan lapisan yang lebih atas yaitu golongan elite. Kehidupan ekonomi kerajaan tidak berwujud kemakmuran tanpa adanya lapisan non elite yang harus membanting tulang untuk menghasilkan keuntungan. Para nelayan misalnya memainkan peran yang mempunyai andil yang besar bagi kehidupan perekonomian di pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota pantai, di tempat mereka menjual hasil tangkapannya. Hal ini terutama sekali kepada orang-orang lapisan atas yang memerlukan bahan makanan yang lebih sempurna dari lapisan di bawahnya. Tidak kurang pentingnya adalah golongan pekerja tukang-tukang (pandai) seperti tukang kayu, pandai besi, pandai emas, dan sebagainya. Para tukang ini melayani kebutuhan golongan atas untuk memenuhi perlengkapan hidupnya. Misalnya untuk membuat rumah dan perabot rumah seperti lemari, kursi, dipan, dan lain-lain. Pandai besi membuat alat-alat seperti pisau, wajan,

senjata untuk prajurit kerajaan, dan sebagainya. Golongan lain dalam lapisan ini adalah prajurit atau tentara kerajaan. Mereka sangat berperan pada saat terjadi peperangan. Dalam situasi damai mereka hanya bertugas sebagai penjaga keamanan kota atau sebagai pengawal raja saja. Maju dan mundurnya kerajaan sangat ditentukan oleh kekuatan tentaranya. Karena itulah pada saat-saat tertentu, semua warga kerajaan yang sudah dewasa diwajibkan “bela negara” untuk mempertahankan kerajaan dari serangan musuh.

Golongan budak, mereka ini adalah orang-orang yang bekerja berat secara fisik – menjual tenaga dan pekerja kasar. Golongan ini tidak hanya laki-laki tetapi juga kaum wanita dan bahkan anak-anak di bawah umur. Perbudakan ini terjadi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya seseorang tidak dapat membayar utang sehingga anak atau salah seorang anggota keluarganya diserahkan sebagai pengganti pembayaran utang. Ada pula yang menjadi budak karena merupakan tawanan perang atau karena akibat dari perdagangan budak.

Golongan ini mengerjakan pekerjaan yang berat-berat seperti pembuatan jalan, mengolah tanah pertanian dan lain-lain. Mereka wajib taat pada peraturan-peraturan yang dibuat majikannya, dan bila majikan tidak menyukainya lagi, ia dapat saja dijual ke orang lain. Mereka tidak diperkenankan bercakap-cakap dengan orang lain apalagi kepada majikannya. Nasib mereka memang sangat menyedihkan.

BAB III

DINAMIKA KEHIDUPAN AGAMA DAN PERANAN PANGGURON GUNUNG JATI

3.1 Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Cirebon

Menurut catatan para ahli sejarah, ajaran agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad XI Masehi. Ajaran Islam ini dibawa oleh para mubaligh dari Pasai (Aceh Utara) dan para pedagang Islam dari Gujarat. Selain itu, ada pula yang diajarkan langsung oleh para pedagang Islam Arab yang berdagang di berbagai kerajaan pesisir di Nusantara ketika itu.

Kemudian ajaran Islam menyebar masuk ke Cirebon. Menurut catatan dari Tome Pires, sejak lebih kurang tahun 1470-1475 sudah ada pengaruh Islam di Cirebon. Dalam abad ke XV dan ke XVI, Kerajaan Sunda pusat kekuasaannya yang terakhir berada di Pakuan Pajajaran (Bogor sekarang) sedang berada dalam situasi kacau. Kekacauan ini merupakan akibat dari pengaruh penyebaran Islam yang masuk melalui pesisir Cirebon dan pesisir Banten. Kekacauan ini diperburuk dengan munculnya berbagai pemberontakan daerah yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Sunda yang pusat kekuasaannya berada di Pakuan Pajajaran.

Sejak sekitar tahun 1480 Cirebon sudah dikuasai oleh Susuhunan Gunung Jati yang dijuluki Pandita-Ratu. Hal ini disebabkan Sunan Gunung Jati selain sebagai Raja Cirebon, ia juga menjadi pemimpin Islam atau sebagai ulama.

Menurut J. Hageman J. Cn (1870) dengan berdasarkan dari cerita rakyat, mengemukakan bahwa: Haji Purwa adalah seorang pemeluk agama Islam yang pertama kali datang ke Galuh (Jawa Barat) pada tahun 1337 Masehi. Haji Purwa masuk Islam ketika ia sedang berada dalam perjalanan berniaga ke India. Ia diislamkan oleh saudagar Arab. Melalui bantuan saudagar dari Arab, Haji Purwa mengislamkan adiknya yang telah menduduki singasana kerajaan di pedalaman Sunda, menggantikan ayahnya. Usaha Haji Purwa ini mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari adiknya. Haji Purwa memutuskan untuk menetap di Cirebon Girang yang pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Di Cirebon Girang, Haji Purwa berusaha mengislamkan kakaknya, tetapi kali ini Haji Purwa juga mengalami kegagalan. Kegagalan mengislamkan adik maupun kakaknya, tidak menyebabkan terjadinya keretakan hubungan keluarga di antara mereka. Kenyataan ini, menunjukkan tingginya tingkat toleransi antara penganut agama dan tidak ada paksaan untuk menganut agama yang baru masuk ketika itu yaitu Islam.

Keadaan masyarakat Cirebon semakin berkembang menuju perubahan yang lebih baik, daripada keadaan sebelum masuknya ajaran Islam.

Sebelum masuknya Islam ke Pulau Jawa pada umumnya dan masyarakat Cirebon khususnya, situasi masyarakatnya cenderung dipengaruhi oleh adanya sistem kasta dalam agama Hindu atau dikenal dengan perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakatnya bertingkat-tingkat dan terkotak-kotak. Mereka yang kastanya lebih tinggi tidak boleh bergaul dengan orang yang berkasta lebih rendah dan seterusnya. Masyarakat Hindu ketika itu membagi kastanya menjadi empat (4) kasta yaitu: kasta brahmana, kasta ksatria, kasta waisya, dan kasta sudra. Sebagai kasta yang paling rendah, kasta sudra sering tertindas oleh kasta lainnya, sehingga kehidupannya selalu diliputi keresahan.

Setelah ajaran Islam masuk dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, susunan masyarakat berdasarkan kasta ini terkikis perlahan-lahan dan dimulailah suatu kehidupan masyarakat baru tanpa penindasan atas hak asasi manusia yang dilatari oleh perbedaan kasta tersebut.

3.2. Peranan Pangguron Gunung Jati dalam Penyebaran Ajaran Islam di Cirebon

Pada awal abad ke XV agama Islam telah berkembang di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur. Di Gresik, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari ajaran Islam. Para santri yang datang sebagian besar berasal dari daerah sekitarnya, namun ada juga yang berasal dari Jawa Barat yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sedangkan daerah Gunung Jati termasuk ke dalam wilayah Singaparna wilayah bawahan Pajajaran. Karena letaknya di tepi Pelabuhan Muara Jati, banyak pedagang asing yang datang ke daerah Gunung Jati. Pedagang-pedagang asing itu berasal dari Cina, Arab, maupun dari Gujarat (pantai barat India). Ramainya perahu dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati tersebut selain karena letaknya yang strategis bagi perniagaan, juga karena penguasa negerinya bersikap ramah Ki Gede Surawijaya penguasa negeri itu dengan syahbandarnya yang bernama Ki Gede Tapa atau Ki Jumajan Jati yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang asing. Alhasil pada masa itu wilayah ini mengalami pergolakan disebabkan ramainya penduduk yang berangan-angan masuk agama Islam. Sebagaimana yang telah dikenal sebelumnya pedagang-pedagang asing yang berasal dari Gujarat dan Arab, selain sebagai pedagang, mereka juga sebagai mubaligh. Para mubaligh itu berfungsi sebagai pembawa dan penyebar ajaran Islam di manapun ia berada. Ketika itu pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat ini juga banyak yang berdagang di kawasan Asia Tenggara.

Pada masa sekitar tahun 1420 M, datanglah serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Idlofi Mahdi. Ia

memohon agar diperkenankan untuk menetap di perkampungan sekitar Muara Jati dengan alasan untuk memperlancar dagangannya. Oleh Ki Surawijaya rombongan Syekh Idlofi Mahdi diizinkan tinggal di kampung Pasambangan di mana terdapat Gunung Jati. Sejak itulah Syekh Idlofi Mahdi memulai kegiatannya. Selain berdagang mereka juga berdakwah yaitu mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya untuk mengenal dan memahami Islam.

Bagi penduduk yang telah mendengar tentang agama itu terus saja mendatangi dan menyatukan diri masuk Islam atas ketulusan hatinya. Untuk ketenangan bagi mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, Syekh Idlofi diperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati untuk kegiatan dakwahnya. Dari sinilah cikal bakal dijadikannya Gunung Jati sebagai pusat penyebaran Islam di Cirebon.

Melalui berbagai cara yang bijaksana dan penuh hikmah, para mubaligh menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam. Dengan begitu dalam waktu singkat Pangguron (perguruan) Islam Gunung Jati sudah didengar sampai ke Pusat Kerajaan Pajajaran. Suatu hari Syekh Idlofi didatangi Raden Walangsungang dan adiknya Ratu Rarasantang serta istrinya Nyi Endang Geulis yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Raden Walangsungang dan Ratu Rarasantang adalah putra-putri Raja Pajajaran yaitu Raden Pawanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi, dari perkawinannya dengan Nyi Mas Subanglarang putri Ki Jumajan Jati. Pada waktu itu kedua putra/putrid raja tersebut sedang belajar di Pangguron Islam Syekh Quro Karawang. Jadi keduanya adalah cucu Syahbandar Pelabuhan Muara Jati yaitu Ki Juman Jati.

Kedatangan putra-putri serta menantu Prabu Siliwangi ke Pangguron Gunung Jati ini tidak seizin ayahnya, karena Prabu Siliwangi kembali ke agama Budha setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia. Sedangkan kedua putra-putri itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati semasa keduanya masih

anak-anak. Karena kedatangan mereka di Gunung Jati selain melaksanakan perintah almarhumah ibunya, juga dimaksudkan untuk sungkem pada eyangnya.

Kehadiran keluarga Raja Pajajaran ini, menjadikan semangat Syekh Idlofi semakin kuat dalam mengembangkan ajaran Islam. Bersamaan dengan itu kemasyhuran Pangguron Gunung Jati semakin menyebar. Adapun kegiatan dagang Syekh Idlofi diserahkan pengelolaan dan pelaksanaannya kepada beberapa orang kepercayaannya, sehingga seluruh waktunya dicurahkan untuk penyebaran ajaran Islam.

Selang beberapa tahun berguru di Pangguron Islam Gunung Jati, Raden Walangsungsang bersama adik dan istrinya diperintahkan oleh gurunya Syekh Dzatul Kahfi untuk membuat pedukuhan (perkampungan). Daerah ini yang merupakan hutan terletak di bagian selatan Gunung Jati. Setelah pedukuhan tersebut terbentuk diberi nama Tegal Alang-Alang dan Raden Walangsungsang dipilih sebagai Kepala Dukuh dengan gelar Ki Kuwu, selain itu ia juga dijuluki Pangeran Cakrabuana.

Dalam waktu singkat Tegal Alang-Alang berkembang pesat. Pedagang-pedagang asing dari berbagai bangsa dan ras membuka pasar di dukuh ini. Sebagai akibat interaksi antar bangsa yang berlainan warna kulit dan berbeda agama dan kepercayaan itu, maka lama-lama pedukuhan ini dinamai Caruban. Di samping itu sebagian besar warganya bekerja sebagai pembuat petis dan menangkap ikan. Petis yang dibuat warga bahannya dari air udang atau bahasa Sunda-nya *cai rebon*, lama-lama masyarakat menyebutnya Cirebon.

Dalam kesibukannya memimpin pedukuhan Cirebon, Pangeran Cakrabuana diperintahkan oleh guru Syekh Dzatul Kahfi agar menunaikan ibadah haji di Mekah bersama adiknya Nyi Ratu Rarasantang. Sedangkan istrinya yang sedang hamil tua diperkenankan tinggal di rumah saja. Untuk mengganti kepemimpinan Pedukuhan Cirebon, beliau menunjuk Ki Gedeng Alang-Alang atau disebut juga Ki Danusela. Dengan kapal dagang

asing yang menuju ke tanah Arab, berangkatlah Pangeran Cakrabuana menuju ke tanah suci Mekah bersama adiknya.

Kedua kakak beradik ini selama berada di tanah suci Mekah, bermukim beberapa bulan di rumah Syekh Bayanullah sambil menambah ilmu agama Islam. Pada waktu itulah, Ratu Rarasantang dipinang, kemudian dinikahkan dengan seorang pembesar kota Isma'iliyah bernama Syarif Abdillah bin Nurul Alim dari suku Bani Hasyim. Untuk lebih mudah diterima oleh lingkungannya, Syarif Abdillah mengganti nama Rarasantang dengan nama Syarifah Muda'im. Dari perkawinan itu kemudian dikaruniai dua orang putra yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah.

Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama Islam, Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon. Dalam perjalanan pulang, Pangeran Cakrabuana singgah di Campa (Kampuchea) dengan maksud akan berguru pada Syekh Maulana Ibrahim Akbar yang menetap di Campa. Kemudian Pangeran Cakrabuana dengan disertai seorang puteri Campa yang ingin berguru di Cirebon, meneruskan perjalanannya kembali ke Cirebon.

Sesampainya di Cirebon pada sekitar tahun 1456, Pangeran Cakrabuana merasa kagum atas kemajuan pedukuhan Cirebon. Setelah penyerahan kembali jabatan Kuwu dari Ki Pengalang-Alang atau Ki Gedeng Alang-alang kepada Pangeran Cakrabuana, Pedukuhan Caruban ditingkatkan menjadi sebuah negeri dengan nama Negeri Caruban Larang, sekaligus pembentukan pemerintahannya. Karena baru pertama kali ada negeri yang menggunakan pola pemerintahan Islam di wilayah Pajajaran, maka berita tentang negeri Caruban Larang begitu cepat menyebar hingga ke pusat Kerajaan Pajajaran. Pada mulanya kenyataan ini tidak berkenan di hati Prabu Siliwangi yaitu berdirinya negeri yang berpola pemerintah Islam ini. Namun karena yang mendirikannya adalah anak sendiri, lama-lama Prabu Siliwangi merestuinnya pula. Bahkan dengan keberhasilan anaknya ini, Prabu Siliwangi memberi gelar kepada Pangeran Cakrabuana dengan gelar Sri Manggana. Gelar ini diberikan saat Prabu Siliwangi meresmikan negeri

Caruban Larang. Adik Pangeran Cakrabuana, yaitu Raden Jaka Sengara yang ikut saat peresmian negeri ini, memutuskan untuk juga menetap di negeri Caruban Larang karena tertarik pada ajaran Islam.

Sebagai dampak dari kemajuan Negeri Caruban yang makin pesat, Pangeran Cakrabuana terus membenahi sarana-sarana pemerintahannya. Ia membangun istana negeri yaitu istana Pakungwati, yang diambil dari nama puterinya sendiri yang lahir ketika ia masih di tanah suci Mekah. Ia juga membangun pertamanan Gunung Sembung sebagai tempat peristirahatan ketika ia berkunjung ke Syekh Dzatul Kahfi. Pertamanan ini terletak di sebelah barat Gunung Jati.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan Nyi Ratu Rarasantang atau Syarifah Muda'im dengan Syarif Abdillah penguasa Kota Isma'iliyah telah dikaruniai dua orang putera, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya, Syarif Nurullah. Sejak kanak-kanak keduanya telah diperintah ayahnya agar menimba ilmu sepenuh-penuhnya dari siapa saja ulama yang mereka gurui. Dengan demikian maka kemungkinan terjadi antara keduanya itu berlainan memilih guru. Adapun ulama-ulama yang menjadi guru Syarif Hidayatullah di antaranya adalah Syekh Tajmuddin al Kubro dan Syekh Atailah Syadzali. Selain ilmu-ilmu agama dan ilmu sosial, ia pun mempelajari Ilmu Tasauf dari ulama-ulama Bagdad.

Pada saat Syarif Hidayatullah berusia dua puluh tujuh tahun Syarif Abdillah meninggal dunia, maka sebagai puteranya yang tertua Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikannya memerintah Kota Isma'iliyah. Akan tetapi karena dia sudah bertekad untuk melaksanakan harapan ibunya, yaitu menjadi muballigh di Caruban, maka dia melimpahkan jabatan itu kepada adiknya, Syarif Nurullah.

Beberapa bulan setelah pengangkatan Syarif Nurullah sebagai penguasa kota Isma'iliyah, ibunda Syarifah Muda'im meninggalkannya untuk pulang ke tanah Jawa bersama Syarif Hidayatullah. Dalam perjalanan pulangnya kedua anak dan ibu itu

beberapa kali singgah di beberapa daerah dengan waktu yang tidak menentu, seperti di Mekkah, Gujarat dan Pasai. Dan sekitar tahun 1475 keduanya baru sampai di Caruban.

Pada masa itu Syekh Kahfi sudah wafat dan dimakamkan di tempat perguruannya itu. Maka dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Muda'im mohon untuk tinggal saja di kampung Pasambangan bersama puteranya Syarif Hidayatullah. Oleh Pangeran Cakrabuana, keduanya diperkenankan tinggal di Pertamanan Gunung Sembung sambil mengajarkan agama Islam sebagai penerus Pangguron Islam Gunung Jati.

Di saat yang sudah ditentukan dan sesuai dengan yang sudah direncanakan, Pangeran Cakrabuana menikahkan Syarif Hidayatullah dengan puterinya Nyi Ratu Pakungwati. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya yang semakin lanjut Pangeran Cakrabuana mengalihkan kekuasaannya atas Nagari Caruban kepada menantu yang juga keponakannya, Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan atau Sunan.

Pada tahun pertama pengangkatannya beliau berkunjung ke Pajajaran guna memperkenalkan diri dan sungkem kepada eyangnya serta mengajaknya kembali ke agama Nabi. Tetapi Prabu Siliwangi tidak menyambut baik ajakan itu. Meskipun demikian tidak menghalangi cucunya itu mengembangkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Karena itu Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Serang yang sebagian rakyatnya sudah sering mendengar tentang Islam dari pedagang-pedagang Arab dan Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Banten. Ternyata di sana mendapat sambutan baik dari Adipati Banten, hingga puterinya yang bernama Nyi Ratu Kawunganten dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah. Dari puteri Adipati Banten ini beliau dikaruniai dua orang putera, Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking.

Berita tentang tampilnya seorang muballigh asal kota Isma'iliyah sebagai Pemimpin Nagari Caruban ini terdengar oleh

Demak yang baru setahun berdiri sebagai Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa di bawah kekuasaan Raden Patah yang bergelar Sultan. Tepatnya pada tahun 1478 Demak berdiri, setelah Raden Patah berhasil menumbangkan kekuasaan Prabu Girindrawardhana penguasa Majapahit yang bergelar Brawijaya VII.

Demi mendengar bahwa di wilayah Pajajaran agama Islam berkembang pesat di nagari Caruban yang dipimpin Syarif Hidayatullah, maka Demak dan beberapa daerah lain menjalin hubungan persahabatan. Di daerah-daerah tersebut ajaran Islam telah disebarkan pula oleh para mubaligh di sana. Setelah mengenal Syarif Hidayatullah, Raden Patah bersama-sama para muballigh lainnya yang kesemuanya sudah bergelar Sunan, menetapkan Syarif Hidayatullah Penguasa Nagari Caruban sebagai Panata Gama Rasul di tanah Pasundan. Panata Gama Rasul artinya yang ditetapkan sebagai pemimpin penyiaran agama Nabi Muhammad SAW di wilayah Jawa bagian barat. Lebih dari itu pada saat Syarif Hidayatullah menghadiri undangan musyawarah para Sunan dalam menyusun strategi pengembangan Islam di Jawa serta rencana untuk membangun Masjid Agung Demak, beliau ditetapkan juga sebagai Sunan Cirebon dengan gelar Sunan Gunung Jati. Bermula dari sini pula terbentuknya Sidang Dewan Wali Sembilan (Walisanga), terdiri dari:

1. Maulana Raden Rahmat : Sunan Ampel (Surabaya)
2. Maulana Makdum Ibrahim : Sunan Bonang (Tuban)
3. Maulana Raden Paku : Sunan Giri (Gresik)
4. Maulana Syarifuddun : Sunan Drajat (Sedayu)
5. Maulana Ja'far Shodiq : Sunan Kudus (Kudus)
6. Maulana Raden Syahid : Sunan Kalijaga (Kadilangu)
7. Maulana Raden Prawata : Sunan Muria (Kudus)
8. Maulana Malik Ibrahim : Sunan Gresik (Gresik)
9. Maulana Syarif Hidayatullah : Sunan Gunung Jati (Cirebon)

Dengan terbentuknya Wali Sanga ini, maka terjalinlah rasa sepenanggungan dalam berjuang menegakkan agama Islam di

tanah Jawa. Karenanya sebagai tindak lanjut dari permusyawaratan itu Raden patah menyarankan agar Caruban sekalian dijadikan Kesultanan yang tidak lagi harus menghaturkan bulubekti (upeti) kepada Pajajaran yang disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan Islam ke kadipaten-kadipaten di wilayah itu. Sekembali dari Demak yang sekian kalinya, dengan bantuan serta dukungan sepenuhnya dari Raden Patah, berdirilah Kesultanan Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah sebagai Sultan yang pertama.

Tindakan Cirebon yang demikian itu jelas sebagai tantangan bagi Pajajaran, sebab dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap negeri-negeri lainnya. Oleh sebab itu tanpa peduli siapa yang duduk di Kesultanan Cirebon itu, Prabu Siliwangi mengirim satu angkatan yang dipimpin oleh Temenggung Jagabaya untuk menangkap cucunya itu. Tetapi karena segala kemungkinan yang bakal terjadi telah diperhitungkan dengan matang oleh Sunan Gunung Jati, maka pasukan dari Pajajaran itu tidak sampai berbuat banyak. Mereka yang hanya berjumlah sekitar enam puluh orang berikut Temenggung Jagabaya akhirnya menyerah dan tidak kembali ke Pajajaran. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan itu, banyaklah yang lainnya menyusul menyatakan diri masuk Islam.

Dengan bertambahnya beberapa orang warga dari Pajajaran, semakin besarlah pengaruh Cirebon bagi negeri-negeri di wilayah Pajajaran seperti negeri Surantaka, Japura, Wanagiri, Galuh, Talaga dan negeri asal Padukuhan Caruban, Singapura yang sudah melebur diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya Pelabuhan Muara Jati, jelas menambah ramainya perdagangan antar nusa sampai ke manca negara. Bahkan yang terbanyak di antara pedagang asing adalah dari Tiongkok yang kebanyakan membawa barang-barang hiasan dari keramik atau porselin. Membanjirnya pedagang Tiongkok di Cirebon ini setelah adanya pembauran melalui perkawinan antara kakak Ki Gede Tapa Nyi Rara Rudra dengan seorang saudagar Tiongkok Ma Huang yang kemudian lebih terkenal dengan nama

Ki Dampu Awang. Dari Ki Dampu Awang inilah Kaisar Tiongkok mendengar bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah keturunan bangsawan Arab. Oleh sebab itu ia mengizinkan anak puterinya di bawa oleh Ki Dampu Awang dan dinikahkannya dengan Sunan Gunung Jati demi keuntungan bangsanya dalam menjalin hubungan dagang di masa-masa seterusnya.

Puteri Kaisar Tiongkok ini bernama Ong Tien yang kemudian diganti dengan nama Nyi Ratu Rara Sumanding. Dari puteri Tiongkok inilah perluasan Kraton Pakungwati Cirebon banyak menggunakan hiasan dinding dari porselin buatan Tiongkok. Tidak sedikit pula hiasan berbentuk guci atau kong dari dinasti Ming yang dibawa ke Cirebon seperti yang masih tersimpan sekarang. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Puteri Ong Tien sebagai isteri ke tiga ini berlangsung pada sekitar tahun 1481, setahun setelah pembangunan Masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon.

Masjid Agung Sang Ciptarasa dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati dengan dibantu oleh Wali Sanga dan beberapa tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan masjid itu Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Sokoguru yang dari kepingan-kepingan kayu disusun menjadi sebuah tiang dan dinamakan Sakatatal. Setelah selesai Masjid Agung pembangunan diteruskan ke jalan-jalan raya yang menuju negeri tetangga sambil menyertakan pembangunan di bidang mental memperluas pengembangan Islam ke seluruh wilayah Pasundan. Sementara Raja Pajajaran hanya bisa bersikap menahan diri meski dalam hatinya sudah sangat cemas karena pengaruh Cirebon yang sudah mendekati pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Namun demikian, sejenak kadang-kadang Prabu Siliwangi merasa bangga demi menyaksikan keberhasilan anak serta cucunya hingga dapat menguasai wilayah sepanjang pantai utara Pasundan. Sikap itulah yang diambil oleh Sang Prabu dan dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana selaku Penasihat Sultan untuk membenahi wilayah negeri dan pengembangan Islam.

Di tengah-tengah kesibukan pembangunan fisik material dan mental di Negeri Cirebon ini, datanglah utusan Raden patah di

Kraton Pakungwati, melaporkan bahwa Malaka sudah diduduki oleh Portugis. Karena itu Demak telah mengirim bala bantuan untuk memperkuat pertahanan Pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa selanjutnya yang dipimpin oleh Dipati Unus. Dalam waktu dekat, Cirebon pun akan dikirim juga bantuan pasukan guna mempertahankan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Kerajaan Malaka diduduki Bangsa Portugis pada tahun 1511 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Pada saat itu banyak para Syekh dan Muballigh yang pergi mengungsi ke negeri-negeri terdekat yang aman. Salah seorang di antaranya ialah Kiyai Fathullah atau Fatahillah atau Faletahan yang mengikuti perjalanan pulang tentara Dipati Unus. Selain menyelamatkan diri dari penjajahan Portugis, kedatangannya ke Demak juga untuk ikut serta membantu pengembangan agama Islam di tanah Jawa seperti yang diharapkan oleh ayahnya Maulana Makhdar Ibrahim, ulama asal Gujarat.

Sebagai putera seorang ulama yang terbilang tinggi ilmu agama dan sosialnya, maka kehadiran Fatahillah di tengah-tengah Kesultanan Demak Pusat Pengembangan Islam di Jawa merupakan harapan baik dalam mengemban tugas suci bersama-sama para muballigh wali yang masih ada. Karena pada sekitar tahun ini ada beberapa orang dari Wali Sanga yang sudah wafat, seperti: Sunan Ampel wafat tahun 1481, Sunan Giri tahun 1506, dan Pangeran Cakrabuana Penasihat dan/atau paman Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah.

Sesuai dengan yang direncanakan bahwa Demak akan mengirim pasukan ke Cirebon untuk bersama-sama mempertahankan Pelabuhan Sunda Kelapa dari pendudukan Portugis, maka diangkatlah Fatahillah oleh Raden Patah menjadi Panglima Pasukan Demak yang akan berangkat ke tanah Pasundan. Tetapi sebelum waktu pemberangkatan itu tiba, pada tahun 1518 Raden patah berpulang ke Rahmatullah dan digantikan oleh Dipati Unus dengan gelar Pangeran Sabrang Lor. Pada saat penobatannya banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan. Karena itu ia harus menyelesaikan lebih dahulu sebelum

melangkah pada tugas utamanya mengembangkan agama Islam. Dalam mematahkan pemberontakan ini, Pangeran Sabrang Lor gugur ± 1521 dan digantikan oleh Sultan Trenggono sebagai Sultan ke III.

Pada awal pengangkatan Sultan Trenggono ini Fatahillah dikokohkan lagi sebagai Pengawal Pasukan yang akan mempertahankan Sunda Kelapa dan langsung diberangkatkan ke Cirebon.

Dari Cirebon Tentara Demak itu bergabung bersama-sama menuju Sunda Kelapa dan tetap dibawah pimpinan Fatahillah. Kenyataan sesampainya di sana pasukan Fatahillah ini tidak hanya berhadapan dengan Portugis, tetapi juga dengan pasukan Pajajaran. Hal ini mungkin diketahui sebelumnya bahwa pasukan Cirebon tidak dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati, karenanya lalu Raja Pajajaran mengambil tindakan dengan menerima tawaran Portugis untuk bekerja sama merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai Cirebon di samping usaha mencegah pengembangan Islam yang lebih luas. Namun demikian pada akhirnya pasukan Pajajaran dapat dipukul mundur dan Portugis pun terusir dari Sunda Kelapa pada tahun 1527.

Langkah selanjutnya setelah penaklukan Sunda Kelapa adalah mengamankan Banten dari gangguan penguasa-penguasa yang masih menganut agama dan kepercayaan lama. Para penguasa tersebut masih menjunjung tinggi seruan Raja Pajajaran yang ketika itu dijabat oleh Prabu Surawisesa.

Dalam hal pengamanan Banten dari gangguan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Prabu Surawisesa, Fatahillah tidak banyak mengerahkan tenaga dan fikiran, sebab di sana sudah banyak ditangani oleh Pangeran Sabakingking putra Sunan Gunung Jati.

Setelah keadaan kembali aman, Fatahillah diperintahkan untuk memimpin di Sunda Kelapa sementara belum ada putra daerah yang diangkatnya. Atas keberhasilannya dalam memimpin dua operasi demi tegaknya agama Allah itu Fatahillah mendapat sebutan nama Kyai Bagus Pasai. Akan tetapi karena keinginannya

menetap di Cirebon, maka sebagai pemimpin di Sunda Kelapa itu hanya beberapa bulan saja.

Pada saat yang sudah direncanakan Sunan Gunung Jati memanggilnya kembali ke Cirebon dengan mengadakan upacara penyambutan dengan meriah, hikmah serta islami. Bersamaan dengan itu Sunan Gunung Jati mengambil isteri lagi seorang puteri dari Ki Ageng Tepasari mantan pembesar Majapahit yang turut dengan pasukan Demak ke Cirebon. Puteri Ki Ageng Tepasari itu bernama Nyi Ageng Tepasari. Hal ini karena alasan, pertama meninggalnya Nyi Ratu Pakungwati dalam peristiwa Memolo Masjid Agung, dan kedua karena dari perkawinannya dengan Nyi Ratu Pakungwati dan dengan Nyi Ong Tien belum dikaruniai anak. Dan kenyataan pada akhirnya dari perkawinan ini dikaruniai dua orang anak, Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin yang kelak menggantikan ayahandanya dengan gelar Pangeran Pasarean.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sultan Cirebon Maulana Syarif Hidayatullah adalah memperluas wilayah Islam ke negeri-negeri sekitar Cirebon. Untuk itu beliau menarik kembali Fatahillah yang sudah menduduki jabatan Bupati Jayakarta itu untuk memimpin pasukannya guna memperluas perkembangan agama Islam. Adapun daerah-daerah sekitar Cirebon yang berhasil ditaklukkan ialah:

1. **Talaga**, sebuah kerajaan kecil di sebelah barat daya Cirebon di bawah kekuasaan Prabu Kucukumun yang beragama Budha. Dalam penaklukan ini yang tampil sebagai panglima adalah Nyi Mas Gandasari Srikandi dari Pasai yang ikut ke Cirebon bersama Pangeran Cakrabuana semasa pulang dari Mekkah. Hal ini untuk menandingi Senapati Talaga yang juga seorang wanita puteri Prabu Pucukumun bernama Nyi Tanjung Rarangan. Pada akhirnya salah seorang dari putera Talaga Arya Salingsingan berhasil dibawa ke Cirebon dan menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan Prabu Pucukumun dan Nyi Tanjung Rarangan melarikan diri ke lereng Gunung Ceremai.

2. **Rajagaluh**, bekas pusat kerajaan Pajajaran sebelum pindah ke Pakuan (Bogor) diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Sebagai bekas Pemerintahan Pajajaran, Rajagaluh menuntut agar Cirebon tunduk dan mengirim upeti seperti dulu. Senapati dari Cirebon oleh Fatahillah dipercayakan kepada Aria Kamuning anak angkat Sunan Gunung Jati dari Ki Lurah Agung untuk menghadapi Aria Kiban Senapati Rajagaluh. Kendati banyak pasukan Cirebon yang gugur namun Rajagaluh dapat juga ditundukkan dengan tewasnya Aria Kiban dan Prabu Cakraningrat sendiri. Dalam penaklukan Rajagaluh itu selain Aria Kamuning dan Nyi mas Gandasari, tampil juga seorang pemuda pendatang dari Bagdad yaitu Raden Magelung Sakti.

Selesai penaklukan Talaga dan Rajagaluh, Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah menyelenggarakan tasyakuran bersamaan dengan menikahkan Fatahillah dengan puterinya Ratu Wulung Ayu. Berkenaan dengan ini jabatan Bupati Jayakarta secara resmi diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Kemudian setelah segalanya diatur dengan tertib dan usia Sultan sudah lanjut, maka Sang Putera Pangeran Muhammad Arifin dinobatkan sebagai Sultan ke II dengan gelar Pangeran Pasarean. Untuk penasihat Sultan yang masih muda ini Sunan Gunung Jati dengan persetujuan warga kesultanan lainnya mengangkat Fatahillah dengan sebutan Ki Bagus Pasai, dan Sunan Gunung Jati kembali ke Gunung Sembung menjadi Penatagama Pasambangan, yakni menjadi guru agama Islam di Pangguron Pasambangan.

Langkah demikian yang diambil oleh Sunan Gunung Jati ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak masih di negeri Mesir bahwa beliau ingin menjadi Pengembang Islam di Jawa. Namun sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Tuhan lebih baik. Pada tahun ke lima pengangkatannya, + tahun 1552 Pangeran Pasarean Sultan ke II Cirebon itu mendahului ayahandanya berpulang ke Rahmatullah. Alhasil pada tahun itu pula Sang Putera Pangeran Sabakingking telah dinobatkan sebagai Sultan Banten yang pertama dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin.

Dengan wafatnya Pangeran Pasarean ini, Sunan Gunung Jati yang sudah merintis ketentraman hari tuanya dengan menata

agama di Pasambangan itu kembali mengambil kebijaksanaan dalam tata pemerintahan Kesultanan Cirebon dengan mengangkat Aria Kamuning sebagai Sultan Cirebon ke III dengan gelar Dipati Carbon I. Sebelum pengangkatannya, Aria Kamuning atau Dipati Kuningan sudah menjadi menantu Ki Bagus Pasai karena memperistri puterinya nama Nyi Ratu Wanawati dan selanjutnya menurunkan empat orang putera-puteri, yaitu: Nyi Ratu Ayu, Pangeran Mas, Pangeran Manis dan Pangeran Wirasaba.

Pengangkatan Aria Kamuning sebagai Sultan Cirebon memang kurang tepat, karena dia adalah anak angkat. Tetapi dikarenakan putera-puteri Pangeran Pasarean masih kanak-kanak, maka Sunan Gunung Jati mengambil kebijaksanaan yang demikian. Itupun atas persetujuan sesepuh-sesepuh Cirebon yang semula meminta agar beliau duduk kembali di Kesultanan.

Masa Pemerintahan Dipati Carbon I lebih kurang dua belas tahun, pada tahun 1565 tahta Kesultannya diserahkan kepada puteranya yang baru berusia 18 tahun, yaitu Pangeran Mas dengan gelar Sultan Panembahan Ratu I. Karena usianya yang masih terlalu muda, maka Sultan Panembahan Ratu I ini banyak memerlukan saran-saran dan bimbingan dari sesepuh Kraton. Sedangkan sesepuh Kraton seperti Sunan Gunung Jati dan Kiyai Bagus Pasai sudah terlalu tua untuk bersanding di Kraton. Oleh karenanya pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I Cirebon sedikit mengalami penurunan, terutama hal pengembangan agama. Untung pada masa Sunan Gunung Jati kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi pusat ajaran agama nenek moyang sudah semua ditundukkan, sehingga langkah untuk selanjutnya tinggal meningkatkan pembinaan agar di antara mereka tidak ada sedikit pun niat ingin memberontak.

Dalam suasana keprihatinan itu, dalam tahun 1568 seluruh warga Kesultanan Cirebon berduka cita dengan berpulangannya ke alam baqa' Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud setelah genap berusia 120 tahun. Bersama Ibu Syarifah Muda'im dan Paman uwaknya Pangeran Cakrabuana, beliau dikebumikan di Pertamanan Gunung Sembung. Dan dua tahun kemudian menyusul pula Kiyai Bagus Pasai Fatahillah dimakamkan di tempat yang sama.

BAB IV

KERAJAAN CIREBON PADA ABAD XVII - XIX

4.1 Kesultanan Cirebon Pasa Masa Kolonial Belanda

Setelah Faletihan wafat yang menjadi Sultan Pakungwati Pangeran Mas atau Penembahan Ratu I. Kemudian pada masa pemerintahan Pangeran Karim atau Panembahan Ratu II dan lebih dikenal dengan gelar Panembahan Girilaya. Mataram yang sudah bergabung dengan VOC (Kongsi dagang Belanda yang telah masuk ke Nusantara sejak tahun 1602) mencurigai Cirebon yang telah merintis kekuatan dengan Banten untuk mengadakan pemberontakan. Oleh karena itu Panembahan Girilaya diundang tanpa alasan sesuatu ke Mataram oleh mertuanya Sultan Amangkurat I. Dalam memenuhi undangan mertuanya itu Pangeran Girilaya mengajak serta istri dan kedua putranya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Sementara Kesultanan dimandatkan kepada putra termuda yaitu Pangeran Wangsakerta. (Hasan Basyari, 1989: 32)

Undangan yang semula dikira sebagai rasa rindu orang tua terhadap anak mantu, ternyata sebagai hukuman atas kecurigaan Mataram kepada Cirebon. Amangkurat menahan Panembahan Girilaya untuk tidak kembali ke Cirebon selamanya hingga wafat dan dimakamkan di Bukit Imogiri pada tahun 1667, dengan rasa

menyesal dan penuh kesedihan kedua putranya kembali ke Cirebon untuk meneruskan tampuk kepemimpinan.

Ternyata setelah sampai di Cirebon ketiga orang putra itu masing-masing merasa berhak menggantikan ayahnya. Maka atas kebijakan Sultan Banten An Nasr Abdul Kohar yang sudah dianggap seketurunan dan atas persetujuan VOC, dipecahkan Kesultanan Pakungwati menjadi tiga bagian, yaitu; Keraton Kasepuhan dipegang oleh Pangeran Martawijaya atau Panembahan Sepuh, Keraton Kanoman oleh Pangeran Kertawijaya atau Penambahan Anom dan Keraton Kacirebonan oleh Pangeran Wangsakerta atau Penambahan Cirebon. (Sartono Kartodirdjo, 1999; 234)

Perlu diketahui dan sebagai bahan perbandingan, bahwa raja (penguasa) Cirebon mempunyai peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya, karena sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Veth, bahwa kekuasaan para “raja” hanya terbatas pada nilai keagamaan saja (Dartono, 1991; 142).

Oleh karena itu untuk lebih menampakkan keislaman, **Pangeran Martawijaya** kemudian bergelar **Sultan Raja Syamsuddin**, **Pangeran Kertawijaya** bergelar **Sultan Moh. Badridin** dan **Pangeran Wangsakerta** mendapat sebutan **Panembahan Tokpati**. Hal ini karena atas persetujuan bahwa yang memperoleh gelar **Sultan** itu hanya Kasepuhan dan Kanoman.

Awal abad XVIII timbul pergolakan dimana setiap ada seorang raja meninggal terjadi lagi pertikaian mengenai kedudukan, seperti tahun 1702 sewaktu Panembahan Sepuh meninggal, dan peraturan baru tersusun pada tahun 1708, apanase semua pihak dikurangi dan diberi daerah-daerah dekat perbatasan Priangan sebagai ganti rugi.

Pada tahun 1715 dan 1733 pergolakan terjadi lagi, untuk mengurangi perselisihan tersebut maka pada tahun 1752 sistem pergeseran dihapus dan peraturan pergantian oleh putra laki-laki ditetapkan. Untuk meredakan perselisihan tersebut, maka VOC

mengizinkan pemakaian gelar Sultan lagi, yaitu pada tahun 1729. (Sartono K., 1999; 235)

Pada tahun 1729 Panembahan Sepuh membagi daerah kesultananannya menjadi dua, masing-masing diberikan kepada kedua putranya yaitu **Sultan Sepuh** dan **Sultan Cirebon**. Panembahan Anom sebagai putra kedua dari Panembahan Ratu (Pangeran Girilaya) diganti oleh putranya yaitu **Sultan Anom**. Namun putra bungsu Panembahan Ratu yaitu Panembahan Cirebon pada tahun 1773 wafat dan beliau tidak mempunyai anak, sehingga daerah kekuasaannya diwariskan kepada Sultan Sepuh, Sultan Cirebon dan Sultan Anom. Jadi pada akhir abad 18 setelah terjadinya pembagian wilayah kesultanan Cirebon, di daerah Cirebon terdapat empat kesultanan yang masing-masing dikuasai oleh **Sultan Sepuh, Sultan Cirebon, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon**. Perlu diketahui bahwa seluruh proses pembagian kesultanan di Cirebon tidak lepas dari campur tangan VOC terhadap keberatan pemerintahan kesultanan di Cirebon, yaitu dengan politik adu domba Belanda terhadap persatuan Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681.

Berawal tahun 1768 penguasa Kompeni di Batavia memecat Sultan Cirebon, alasannya karena telah melakukan korupsi. Otomatis daerahnya diserahkan kepada Sultan Sepuh oleh VOC. Sedangkan Sultan Cirebon dibuang ke Maluku. Dengan tindakan VOC itu, akhirnya Kesultanan Cirebon hanya dikuasai oleh Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Dalam mengendalikan pemerintahannya kedua Sultan tersebut selalu tergantung kepada Kompeni di Batavia (Edi Ekadjati, 1990, hlm. 99).

Setelah peran VOC dalam mencampuri urusan kesultanan terlihat ketika Sultan Anom yang biasa disebut Sultan Kanoman wafat pada tahun 1798. Rakyat mengharapkan sebagai penggantinya adalah Pangeran Surianagara atau Raja Kanoman namun keinginan rakyat ditolak Belanda, dengan sengaja Belanda mengangkat Pangeran Surantaka, konon Pangeran Surantaka tidak disenangi oleh rakyat. Sedangkan Raja Kanoman yang sangat dicintai oleh rakyatnya diusir dari keraton bersama kedua orang saudaranya yaitu Pangeran Kabupaten dan Pangeran Lautan.

Bersama kedua saudaranya, Raja Kanoman pergi meninggalkan keraton, masuk desa keluar desa dengan membuat kebajikan sehingga lama kelamaan mendapat simpati dari masyarakat Cirebon. Karena saat itu di wilayah Cirebon sedang dilanda keresahan, berhubung rakyat di sana serasa habis tenaganya diperas oleh orang-orang Cina yang menyewa desa mereka. Orang Cina memberlakukan pajak tinggi seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak jembatan dan sebagainya. Jadi dengan adanya ketiga tokoh tersebut rakyat merasa tenang dan terayomi kehidupannya, mereka merasakan telah menemukan pimpinan baru yang siap melaksanakan perintahnya.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang Cina dan Belanda di desa-desa terhadap rakyat menimbulkan pertikaian, terutama mengenai penggantian pemimpin mereka di Cirebon, sehingga terjadi huru-hara dan timbul kekacauan yang berlangsung belasan tahun (Edi Ekadjati, hlm. 100). Di antaranya pada tahun 1802 timbul pertentangan dan perlawanan terhadap Belanda tidak saja di daerah Cirebon melainkan telah meluas ke daerah Karawang yang waktu itu beribukota di Kandanghaur dan daerah Sumedang sebelah timur laut. Sasaran pertama rakyat adalah menyerang orang-orang Cina yang telah memeras mereka. Akibatnya banyak orang-orang Cina yang tewas dibunuh dan diusir dari wilayah Cirebon, misalnya di daerah Palimanan, Lokbener, dan Darmayu.

Demikian pula pengaruh perlawanan rakyat Cirebon terhadap orang-orang Cina, membawa dampak negatif terhadap Belanda. Dimasa kedudukan Belanda di wilayah Cirebon mulai terancam, misalnya pendapatan penerimaan dari pajak dan penjualan hasil bumi mulai berkurang. Sehingga Belanda berpikir kalau hal ini tidak dicegah maka akan menyulitkan kedudukannya, maka Belanda mengambil keputusan dengan menumpas perlawanan rakyat Cirebon tersebut.

Pangeran Suriawijaya disinyalir oleh Belanda yang telah membuat kerusuhan di wilayah Cirebon. Hal ini diperkuat oleh Residen Cirebon S.H. Rose bahwa yang menyebarkan desas-desus

untuk membenci Belanda adalah Raja Kanoman. Diperintahkan pula supaya para ulama yang memihak Kanoman harus ditangkap. S.H. Rose juga menganjurkan kepada Belanda di Batavia, apabila mau menumpas gerakan, pemerintah Belanda harus mengundang Raja Kanoman beserta kedua orang saudaranya ke Batavia dengan alasan untuk mengadakan perundingan. Alhasil Raja Kanoman beserta kedua orang saudaranya diundang ke Batavia. Sesampainya di Batavia Raja Kanoman beserta saudaranya bukan diajak berunding melainkan ditangkap, ditahan kemudian dibuang ke Ambon. Mendengar kabar bahwa Raja Kanoman ditawan Belanda pada tahun 1805 rakyat Cirebon dengan 1000 orang mengadakan long march, berjalan ke Batavia, mereka menuntut supaya Raja Kanoman dibebaskan dan dinobatkan sebagai Sultan di Cirebon (Edi Ekadjati, hlm. 101).

Namun S.H. Rose selaku Residen Cirebon yang mencari muka terhadap atasannya Pemerintah Belanda, mengajukan resolusi kepada pemerintah di Batavia tanggal 26 Februari 1805 yang memberitahukan bahwa ada gerombolan orang Cirebon menuju Batavia untuk mengajukan permohonan supaya Raja Kanoman diangkat menjadi Raja Cirebon. Rose menganjurkan supaya dikeluarkan perintah oleh Belanda kepada para Bupati, jangan memberi jalan kepada gerombolan tersebut. Bupati Karawang R.A. Surialaga diperintahkan, apabila gerombolan tiba di Karawang dicegat dan disuruh kembali ke Cirebon. Berdasarkan resolusi 15 Maret 1805, Belanda mengirimkan kapal ke Cilincing guna mengangkut gerombolan untuk dibawa kembali ke Cirebon. Akhirnya terjadi pengembalian rombongan ke Cirebon selesai secara keseluruhan tanggal 7 Mei 1805.

Rakyat Cirebon tidak berhenti begitu saja, walaupun pimpinan mereka telah dibuang ke Ambon, situasi pergolakan terus berlangsung malahan meningkat dan meluas. Dewan Penasehat Belanda di Batavia mengirim delegasi dipimpin mantan Residen Cirebon P. Walbeek. mengajukan suatu perjanjian yang berisi sebagai berikut:

- Raja Kanoman akan dikembalikan

- Belanda akan memperbaiki keadaan rakyat
- Orang Cina tidak akan diperbolehkan lagi menyewa desa dan tidak diizinkan tinggal di udik
- Perhambatan dibatasi
- Pemerintah Kolonial Hindia Belanda akan mengangkat Patih dan beberapa menteri bagi tiap raja, supaya pemerintah lebih tetap
- Kepada Raja Kanoman akan diberi 1000 cacah oleh Panembahan Cirebon hingga tahun 1773
- Penghasilan Residen dari kopi yang besar sekali jumlahnya akan dikurangi

Membaca isi perjanjian itu rakyat Cirebon marah dan menolaknya. Mereka beranggapan bahwa perjanjian tidak menjamin adanya perbaikan terhadap kehidupan rakyat Cirebon, terutama dari segi perekonomian diganggu, tenaga mereka diperas. Sehingga mereka berani mengadakan perlawanan terutama terhadap Cina, golongan feodal dari kalangan kesultanan dan Belanda. Belanda menghadapi keadaan ini sulit untuk memadamkannya. Hal ini menambah kekuatan bagi rakyat Cirebon, walaupun keadaan sosial ekonomi semakin susah justru lahir kekuatan dan tampil seorang kesatria yang berani memimpin perlawanan terhadap Belanda yaitu Bagus Rangin.

Raja Kanoman merupakan sosok yang disegani dan figur yang dihormati serta menjadi panutan rakyat Cirebon dalam menentang Belanda. Demikian pula Bagus Rangin melanjutkan perjuangan Raja Kanoman menentang Belanda. Markas Bagus Rangin berpusat sekitar daerah Jatitujuh – Kabupaten Majalengka sebelah utara – Karesidenan Cirebon. Banyak rakyat yang simpatik serta suka rela ikut bergabung dengan pasukan Bagus Rangin.

4.2 Cirebon Sebagai Bandar Dagang

Pengaruh Islam ini kuat sekali dimana daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa sejak abad XI telah memiliki beberapa

pemukiman orang Islam. Kemudian berkembang hingga abad XV-XVI. Dalam hal ini peranan para wali dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa sangat besar terutama kelompok Walisanga, sangat memperhatikan peran dan memperlihatkan cirri-ciri aktivitasnya, misalnya:

- Para wali tidak memperluas wilayah tetapi menjalankan pengaruh melalui pesantren, missal Sunan Giri telah menerima santri dari wilayah timur Nusantara seperti Ternate, Tidore, Hitu.
- Para wali tidak mengembangkan pengaruh politik dan menyerahkan kekuatan politik pada tangan raja, missal: Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga telah membantu mengembangkan kekuasaan politik kepada Kerajaan Demak (Sunan Ampel, Sunan Bonang) Pajang dan Mataram (Sunan Kalijaga).
- Wali mengembangkan wilayah dan membuat lembaga kerajaan dan sekaligus mengembangkan agama Islam seperti yang diperankan oleh Sunan Gunung Jati, baik Cirebon maupun di Banten. (Cirebon Sebagai Bandar Kalur Sutra, 1996; 38)

Daerah Cirebon dalam kedudukannya sebagai pemacu berkembangnya Islam di Jawa Barat serta hubungan Cirebon dengan pusat kekuasaan lain di sekitarnya bias memberi gambaran pada beberapa kenyataan misalnya:

- Cirebon merupakan salah satu Bandar tertua di timur
- Jawa Barat pada kurun waktu tertentu berhasil mengembangkan perdagangan regional maupun internasional
- Kedudukan dan kharisma Cirebon, terutama semasa Sunan Gunung Jati sampai Panembahan Ratu sangat dihormati dan “dituakan” baik oleh Banten maupun Mataram
- Cirebon telah berperan dalam menentukan barometer Islamisasi di wilayah Jawa Barat.

Karena Cirebon identik dengan Bandar atau Kota Pelabuhan, dulu peranan Cirebon sebagai tempat pemandian suci, namun lama kelamaan sesuai dengan berubahnya jaman Cirebon telah berganti menjadi pelabuhan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan ekonomi dan perdagangan serta perhubungan dengan dunia luar. Dulu di Kecamatan Cirebon Utara terdapat Sungai Bondet yang lebar, sangat memadai sebagai tempat berlabuh kapal-kapal layar yang berukuran besar. Kemudian pada tahun 1415 datang armada Cina dipimpin Laksamana Te Ho dan Kun Wei Ping berlabuh di Muara Jati. Mereka transit untuk membeli perbekalan seperti air bersih maupun pangan. Cina sangat tertarik dengan pelabuhan Cirebon oleh karena itu, Te Ho bekerjasama dengan Ki Gedeng Tapa penguasa setempat untuk membuat mercusuar sebagai tanda guna memudahkan kapal-kapal keluar masuk pelabuhan pada malam hari. Dan membuka perwakilan dagang Cina. Perkembangan selanjutnya pelabuhan Cirebon menjadi ramai, setiap hari terjadi jual beli barang kebutuhan. Mereka datang dan pergi berasal dari Cina, Arab, Persia, India, Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur dan Palembang (Adeng dkk., 1998, hlm. 49).

Perkembangan pelabuhan Cirebon berlanjut seperti perdagangan internasional, terutama yang berhubungan dengan Cina, mereka selalu membawa barang dagangan berupa kain sutera yang sangat tinggi nilai jualnya dan mereka melakukan selama berabad-abad. Selain sutera Cina juga membawa rempah-rempah, buah-buahan, porselen, mesiu dan lain-lain, bahkan perdagangan jalur sutera itu sampai memperkaya khazanah budaya dan agama yaitu adanya peninggalan bangunan Kelenteng Vihara serta tulisan dari kaca. Rute yang mereka tempuh sulit, banyak menghadapi rintangan seperti, badai pasir, cuaca panas, cuaca dingin bahkan para penyamun dan perompak. Menghadapi kenyataan itu para pedagang mencari jalan alternatif baru yang mudah dan aman. Yaitu faktor ekonomi dan perdagangan ditempuh dan menemui bentuknya yaitu sistem transportasi laut menjadi motivasi kuat untuk membuka pusat-pusat perdagangan baru. Perdagangan kawasan dunia barat dan timur. Bagi orang-orang Eropa menginginkan barang dari dunia timur adalah sutera dan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka menempuh beribu-ribu mil untuk

menghubungkan timur dan barat dalam upaya perdagangan itu. Dataran Asia ditempuh dengan jalan darat yaitu dengan berkuda kalau melintasi daerah padang rumput atau unta untuk daerah padang pasir, sedangkan melalui Laut Tengah, Samudera India, Laut Cina Selatan ditempuh dengan jalan laut. Dengan demikian muncul pelabuhan-pelabuhan baru sebagai pusat-pusat perdagangan dari Cina sampai Eropa, di mana Nusantara termasuk dalam jaringan perdagangan tersebut.

Demikian pula dengan Cirebon karena letak geografisnya sangat strategis yaitu di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa termasuk ke dalam mata rantai perdagangan internasional masa itu. Jadi kedatangan kapal-kapal asing di Cirebon memperjelas keterkaitan Cirebon dalam jaringan internasional. Pesatnya perkembangan pelabuhan Cirebon didukung adanya politik ekspansi dari Kerajaan Islam (di bawah pimpinan Demak) untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan Pajajaran. Setelah Banten dikuasai (1526) dan Sunda Kelapa (1527) maka seluruh pesisir utara Jawa Barat sudah berada di bawah kekuasaan Islam. Akibat politik ini bandar-bandar lain termasuk Cirebon merupakan tempat jaringan perdagangan internasional atau pasar dunia yang menjadi sumber ekonomi dan perdagangan serta sumber penghasilan kerajaan-kerajaan Islam yang sedang tumbuh dan berkembang terbentang dari Demak, Cirebon hingga Banten (Adeng, 1998, hlm. 51).

Cirebon sebagai kota pelabuhan identik sebagai pusat perekonomian dan perdagangan di wilayahnya dan berfungsi sebagai keluar masuknya barang-barang kebutuhan ke pedalaman terpencil melalui jalur darat atau sungai, misalnya: jasa angkutan dan transportasi. Erat hubungannya dengan pasar internasional dan domestik, yang membutuhkan jalur transportasi sehingga terbentuk pusat-pusat pengumpulan barang dagangan di tempat-tempat tertentu untuk didistribusikan ke wilayah pedalaman yang sangat membutuhkan atau sebaliknya. Adanya timbal balik kebutuhan itu saling menopang antara pelabuhan dan pedalaman. Keberadaan sungai di Cirebon berperan sebagai jalan lalu lintas yang dapat dilayari perahu atau kapal sampai pedalaman, misalnya

Sungai Krian dapat dilayari sampai Cirebon Girang, Sungai Cimanuk di sebelah utara dan Sungai Cilosari di sebelah timur dapat menghubungkan daerah pesisir hingga pedalaman daerah Cirebon.

Wilayah pedalaman diandalkan sebagai penghasil bahan-bahan pertanian, apalagi daerah pedalaman Cirebon tanahnya subur karena terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta daerah pegunungan di antaranya gunung berapi, seperti; Gunung Ciremai, Gunung Tampomas dan Gunung Sawal. Hasil pertanian seperti sayur-mayur, buah-buahan, ternak, padi, tarum atau indigo sangat dibutuhkan pula oleh dunia internasional. Sebaliknya barang-barang dari luar yang menarik perhatian masyarakat pedesaan adalah logam besi, emas, perak, tekstil halus (sutera) dan barang pecah belah seperti keramik. Dan yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat pedalaman yang dibawa dari luar adalah: beras, garam, terasi, ikan asin dan rempah-rempah. Semua itu adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Diperkirakan jalan darat yang menghubungkan Cirebon dengan pedalaman sudah ada sejak Kerajaan Hindu Pajajaran dan Galuh maupun Kerajaan Islam Demak dan Cirebon. Dalam ekspedisi itu sampai ke Kuningan, Galuh, Palimanan, Ciamis, dan Telaga dengan berjalan kaki, berkuda atau mengendarai gajah. Van Inhoff (1746) menceritakan di antaranya ada dua jalan darat dari Banyumas menuju Tegal dan jalan menuju daerah Priangan yaitu Kawali (Ciamis) menuju Cirebon melalui Panjalu, Telaga (Kuningan), Sindang Kasih (Majalengka), Galuh (Plumbon lalu ke Cirebon). (Adeng, dkk., 1998, hlm. 54)

Dalam transaksi perekonomian dan perdagangan Cina mempunyai peranan besar dalam jual beli barang dagangan baik yang dipergunakan oleh masyarakat pedesaan, dengan luar daerah maupun dengan dunia internasional, biasanya memakai sistem barter atau tukar menukar barang kebutuhan atau dengan mempergunakan mata uang Cina sebagai alat tukar terutama di Jawa. Uang Cina tersebut didatangkan langsung dari Cina bahkan berlangsung terus sampai jaman VOC. Selain mata uang Cina

sebagai alat bayar ada juga uang Portugis disebut *Crusados*, uang Malaka disebut *Calais*, uang lokal Jawa disebut *tumdaya* atau *tail*. Di antara mata uang tersebut tidak jelas uang mana yang dijadikan ukuran sebagai alat bayar. Seperti uang Cina yang ditengahnya berlubang diikat, setiap ikatan memuat 100 keping uang logam tersebut nilainya sama dengan lima calais Malaka.

Sebelum kedatangan kebudayaan Hindu lalu lintas uang di Nusantara sudah ada berupa uang stempel. Walaupun nilainya dibawah nilai nominalnya. Masuk jaman Hindu bentuk uang berupa koin emas dan koin perak. Demikian pula pada awal Kerajaan Islam terutama di daerah pesisir pantai yaitu daerah jalur ekonomi dan perdagangan, dikenal berbagai jenis mata uang. Di Banten ditemukan alat tukar berupa uang perak dan tembaga, di Sumenep berupa bahan celup yang dioleskan pada kain yang sudah dipakai, di Cirebon berupa takaran kecil dari timah disebut picis. Sementara di Aceh biasanya dulu para penguasa berkumpul untuk melaksanakan pencetakan uang. Sedang di Palembang, Jambi, Bangka, Mempawa alat tukar terbuat dari timah, di Pontianak terbuat dari tembaga dan timah, Banjarmasin uang terbuat dari tembaga dan di Sulawesi uang terbuat dari emas dan timah hitam. (Adeng, dkk., 1998, hlm. 58)

Jelas arus lalu lintas perekonomian dan perdagangan di pelabuhan Cirebon begitu ramai, tapi sayang dalam sumber sejarah yang ada tidak menggambarkan kapan kondisi puncak masa kejayaan Cirebon itu. Namun dari gambaran tentang situasi perekonomian dan perdagangan masih dapat dilihat dari catatan harian yang dibuat Belanda. Disebutkan masa perdagangan Cirebon pada abad 17, justru pada masa itu Cirebon mulai mengalami kemunduran akibat percaturan politik antara Banten – Mataram dan Belanda, dengan demikian Cirebon tidak dapat lagi mempertahankan kemajuan-kemajuannya di bidang politik dan perekonomian. Dimana perdagangan melalui bandar Cirebon mengalami penyusutan, terutama sejak terjadinya serangan Mataram ke Batavia ada kecurigaan kompeni Belanda terhadap Cirebon dan Mataram. Disebutkan pula tanggal 30 April 1632 ada sekitar empat atau lima ribu orang dari Mataram dan

1.000 orang dari Cirebon dibawah pimpinan orang kaya Mattassary berangkat ke Batavia. Diceriterakan pula 50 kapal dari Cirebon membawa muatan beras mendarat di sebelah timur Karawang. Tanggal 7--12 Mei 1632 datang perahu-perahu dan kapal Melaya dari Cirebon membawa gula, minyak dan lain-lain untuk keperluan Batavia.

Sementara perdagangan dari pelabuhan Cirebon terus berlangsung ke Batavia. Ternyata Cirebon masih melakukan perdagangan ke daerah-daerah lain seperti dengan Tiku di Sumatra Barat pada tanggal 28 Maret 1633 di Tiku ada 2 buah perahu dari Cirebon yang akan membawa 1.000 atau 5.000 pikul lada. Tanggal 16 April 1633 ada 2 buah jung kepunyaan raja Cirebon berlayar dari Selebar mengalami kerusakan karena menabrak karang. Tanggal 30 April 1633 ada kapal melewati Selat Sunda menuju Cirebon. Tanggal 19 Desember 1633 ada kapal-kapal dari Cirebon menuju Batavia membawa gula, asam dan beras. Tanggal 9 dan 26 Oktober 1634 ada kapal-kapal dari Cirebon membawa gula dan beras menuju Batavia. Tanggal 8 Oktober 1632 kedatangan 20 kapal jung di Batavia bermuatan minyak kelapa, gula hitam, beras, buncis putih dengan nahkoda Simkeij. Tanggal 26-30 Oktober 1634 kapal-kapal dari Cirebon membawa muatan daging kijang, buah mangga dan pisang serta barang lainnya.

Disebutkan pula menurut catatan Belanda tanggal 30 April 1675 perekonomian dan perdagangan dari pelabuhan Cirebon memuat 25 kapal dengan 1067 orang tiba di Batavia dengan membawa 38.000 potong arax pullenkens, 10 potong ibung asinan, 287 karung gula hitam, 1717 karung beras, 155 pot minyak, 24 sak kapas, 10.000 butir telur asin, 10 karung gula putih, 1.300 ikat padi, 2 pikul tembakau Jawa, 1.100 pot, 250 bakul kosong begal, 30 pikul cardemango dan 200 lembar kulit kerbau. Hingga tahun 1678 tercatat bahwa kapal-kapal yang berasal dari Cirebon tiba di Batavia memperdagangkan bermacam-macam komoditi. (Adeng, dkk., 1998, hlm. 61)

Sementara VOC dalam tahun 1619 sudah dapat menguasai Jayakarta dan tahun 1780 VOC berhasil menguasai seluruh

perdagangan dan pelayaran di Jawa. Setelah menguasai perdagangan VOC melarang pihak swasta di Jawa menjalankan pengangkutan perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Selanjutnya untuk mencari keuntungan VOC melakukan monopoli import dan ekspor bagi komoditas-komoditas penting serta memberlakukan peraturan pembatasan tanda berlayar bagi 14 pelabuhan yang ada di Jawa, artinya sebuah kapal hanya mendapatkan sebuah tanda berlayar tujuan Pulau Jawa. Namun di 4 pelabuhan seperti Surabaya, Gresik, Semarang dan Cirebon sebuah kapal mendapatkan dokumen berlayar dengan tujuan Selat Malaka dan Pulau Sulawesi. Seandainya seorang nahkoda menginginkan izin berlayar lebih lama harus mendapatkan dokumennya di Batavia. Karena Batavia sebagai pangkalan utama VOC juga Batavia sebagai ibukota VOC di Asia merupakan pusat perdagangan utama di pesisir Jawa. Jadi arus barang baik lokal maupun internasional dikoordinasi dari Batavia, sedangkan pelabuhan-pelabuhan lain hanya untuk memenuhi persediaan yang dibutuhkan Batavia.

Kekuasaan terus berlanjut dengan mengadakan serangkaian perjanjian-perjanjian dengan Sultan-sultan Cirebon yang ditandatangani pada tanggal 30 April 1681, 4 Desember 1685, 8 Desember 1688, 4 Agustus 1699, 17 Januari 1708 dan tanggal 18 Januari 1752. Kesempatan bagi VOC dengan adanya perjanjian itu untuk mengembangkan ekonomi dan politik di wilayah Cirebon terutama dalam menguasai Priangan Timur penghasil lada dan menjadikan Cirebon sebagai penghalang terhadap Mataram. Dalam bidang politik VOC menekan Cirebon supaya sultan-sultan membatalkan perjanjian dengan Mataram. Sedangkan di bidang ekonomi VOC melakukan monopoli perdagangan ekspor seperti beras, lada, gula, kayu serta memegang hak monopoli memasukan opium dan impor barang. Dengan demikian perekonomian dan perdagangan Cirebon dikuasai oleh Kompeni Belanda. Untuk kepentingan perdagangan, VOC memperbaiki dan memperluas bandar Cirebon beberapa tahap seperti pada tahun 1865, 1888, 1918, dan 1919, dengan menghabiskan biaya F.800.00. (Adeng, 1998, hlm. 63)

Walaupun pelabuhan Cirebon telah diperbaiki dan diperluas, bukan sebagai pelabuhan besar melainkan hanya sebagai pelabuhan menengah. Tapi terbesar di antara pelabuhan Tegal, Pekalongan dan lain-lain. Sedangkan yang disebut pelabuhan besar adalah pelabuhan yang mempunyai kapasitas dalam pemakaian dan keluar masuknya kapal-kapal besar seperti Tanjung Priok, Semarang, dan Surabaya. Misalnya saja menurut catatan Belanda selama tahun 1726 bongkar muat dan keluar masuknya kapal-kapal di pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 13.936 kali, Surabaya 13.854 kali, Semarang 13.427 kali dan pelabuhan Cirebon 7.589 kali.

VOC mulai menderita kerugian besar, karena para penduduk melakukan penyerahan-penyerahan barang kepada pihak lain. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh para pegawainya secara tidak sah dalam jumlah besar sangat merugikan VOC. Pendapatan gelap para pegawainya itu merupakan salah satu sebab keruntuhan VOC. Oleh karena itu pada akhir tahun 1799 VOC dibubarkan, secara otomatis daerah kekuasaannya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Bekas jajahan VOC di Indonesia itu diperintahkan oleh Gubernur Hindia Belanda (*Gouvernement van Nederlandsch Indie*). Termasuk seluruh beban utang VOC diambil alih yang berjumlah 134 Gulden. Pada akhir abad 18 beban rakyat di Jawa sudah terlalu berat, karena berbagai macam tuntutan akan barang dan jasa oleh VOC, para pegawainya, para raja, kepala-kepala daerah atau bupati dan orang-orang Cina meningkat terus. (Kosoh S., dkk., 1994, hlm. 138).

Sementara pemerintahan Hindia Belanda yang beribukota di Batavia tetap berdiri dan sejak 1 Januari 1800 pemerintah Hindia Belanda mengangkat pegawai VOC menjadi pegawai negeri. Perubahan yang bersifat secara administrasi di atas kertas itu tetap berjalan seperti rodi, penanaman kopi, lada, tebu, kapas, pajak, dan lain-lain. Namun sebaliknya kedudukan Negeri Belanda di dunia internasional sangat lemah dan berada di bawah kekuasaan Perancis. Sementara peperangan Inggris – Perancis terus berlangsung, sehingga satu persatu jajahan Belanda di Indonesia dirampas Inggris dan yang tinggal dikuasai Belanda hanya Pulau Jawa. Oleh karena itu Belanda berusaha mengeksploitasi Pulau

Jawa sebesar-besarnya, maksudnya bagaimana caranya megambil keuntungan dari Pulau Jawa. Peranan Jawa Barat dianggap penting, karena Jawa Barat memenuhi kebutuhan pokok Belanda, tanpa ekspor kopi dan lada yang dihasilkan Jawa Barat, Pemerintah Hindia Belanda tidak akan memperoleh pendapatan.

Tekanan bangsa Eropa ini berpengaruh sekali terhadap kehidupan para sultan terutama di Kesultanan Cirebon, kerja rodi tetap berjalan, sehingga pecah perlawanan terhadap tentara Deandels yang memang sebelumnya memeras rakyat dengan kerja rodi untuk pembuatan jalan.

4.3 Reaksi Terhadap Kekuasaan Belanda

Daerah Palimanan letaknya tidak jauh dari daerah Jatitujuh dan Majalengka, mulai terganggu keadaan daerahnya, karena tindakan sewenang-wenang penguasa daerahnya yang melakukan hal-hal yang menyengsarakan rakyat Palimanan. Pasalnya daerah tempat tinggal rakyat Palimanan banyak yang disewakan oleh Bupati kepada orang-orang Cina berikut dihisap tenaganya dan dikenakan pajak yang tinggi. Rakyat Palimanan protes kepada Bupati supaya diberi keringanan pajak, namun jawaban Bupati tidak memuaskan malahan seolah-olah membela kepentingan Cina. Rakyat marah dan berusaha mengadakan perlawanan. Rakyat minta nasehat Bagus Rangin bagaimana baiknya tindakan mereka. Bagus Rangin menganjurkan bahwa yang dikalahkan terlebih dahulu adalah Bupati dan wakil Residen Belanda, karena menurutnya kedua orang itulah yang paling bertanggung jawab terhadap kesengsaraan rakyat Palimanan (Edi Ekadjati, hlm. 104).

Setelah segala sesuatu persiapan perlawanan beres serta mendapat restu dan dukungan Bagus Rangin, rakyat Palimanan mulai bergerak maju dibawah pimpinan adik Bagus Rangin yaitu Bagus Serit. Sasaran pertama mereka langsung menyerbu pendopo kabupaten dan membunuh Bupati Tumenggung Madenda, setelah selesai kemudian mendobrak rumah kediaman wakil Residen Belanda dan membunuhnya pula. Demikian pula rumah para bangsawan dan orang-orang Cina dikepung dan diserang. Setelah

berhasil mereka kembali ke tempat asalnya sementara yang lain bergabung dengan Bagus Rangin.

Banyak rakyat yang bergabung dengan Bagus Rangin sehingga pasukannya berjumlah antara 300 sampai 500 orang yang sudah terlatih untuk berperang. Selain Bagus Rangin sebagai pemimpin umum para pemimpin perlawanan masih banyak lagi di antaranya Bagus Wariem dan Bagus Ujar dari Bayawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari Jatitujuh, Rontui dari Baruang Wetan, Bagus Sidung dari Sumber, Bagus Arisem dari Loyang, Bagus Suara dari Bantarjati, Bagus Sanda dari Pamayahan, Bagus Narim dari Lelea, Bagus Jamani dari Depok, Demang Penangan dari Kandanghaur, Demang Wargagupita dari Kuningan, Wargamanggala dari Cikad, Wirasraya dari Mamis, Jurangprawira dari Linggajati, Jayasasmita dari Ciminding, Jangbaya dari Luragung, Harmanis dari Cikad, Anggasraya dari Timbang, Demang Jayaprawata dari Nagarawangi, Demang Angonklangon dari Weru, Ingabei Martamanggala dari Pagebangan, Demang Jayapratala dari Sukasari. Banyaknya para pemimpin perlawanan itu menunjukkan betapa luasnya daerah perlawanan terhadap Belanda, yang meliputi wilayah Kabupaten Subang, Karawang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon dan Kuningan. Keberhasilan semua itu tidak luput dari dukungan masyarakat yang banyak membantu baik dari tenaga yang dibutuhkan, maupun makanan, beras, senjata dan bantuan moril. Dari desa-desa Benuang Kulon, Malandang, Conggeng, Cililin, Depok, Selaawi dan Sukasari. Sedangkan kepala-kepala desa yang membantu perlawanan adalah Batununggal, Tegal, Bentang, Gerudu, Cinaka, Tanggulun, Tambal, Ayer, dan lain-lain. Seluruh rakyat dan masyarakat mendukung perjuangan dan perlawanan pasukan yang dipimpin Bagus Rangin, dengan persenjataan seadanya berupa tombak, pedang, bedog, keris, senapan, dan meriam.

Karena banyaknya dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil dari rakyat terhadap keberhasilan pasukan yang dipimpin Bagus Rangin. Maka van Lawick pernah memberitakan dalam resolusi 25 Februari 1806 tentang adanya gerakan di daerah perbatasan Sumedang dan Cirebon daerah Jatitujuh dan

sekitarnya bahwa ada gerombolan yang berjumlah 1000 orang. Untuk mengantisipasi keadaan Gubernur Jenderal A.H. Wiese mengirim 50 upas dan beberapa serdadu. Demikian pula menurut F.W. Stapel sampai tahun 1806 jumlah pemberontak ada sekitar 40.000 orang.

Gubernur Jenderal A.H. Wiese 1805-1808 dengan persetujuan Dewan Penasehat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, segera menugaskan Nicolaes Engelhard sebagai pemimpin pasukan dan dibantu oleh pasukan putra Bupati Bangkalan Mangkudiningrat untuk segera menumpas perlawanan rakyat Cirebon pimpinan Bagus Rangin.

Akibat pertempuran yang berlangsung lama dan banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Dua orang Kepala Distrik yaitu putra Patih Sumedang menjadi korban, dua puluh lima orang prajurit Sumedang ditawan dan kemudian dihukum mati, sedangkan pasukan Bagus Rangin lebih banyak jatuh korban, namun sebagian besar pasukannya berhasil meloloskan diri. Untuk meredakan pertempuran kedua belah pihak mengadakan perjanjian pada tanggal 1 September 1806 antara Sultan Sepuh dan Sultan Anom dengan pemerintah kolonial Belanda, isinya antara lain menetapkan, "Raja Kanoman beserta saudaranya dikembalikan ke Cirebon dan dinobatkan menjadi Sultan. Orang-orang Cina tidak diperbolehkan tinggal di daerah pedalaman dan kepada para sultan yang memihak Belanda tidak diperkenankan memeras rakyatnya". Namun sampai berlakunya perjanjian itu belum dapat meredakan perlawanan rakyat daerah Jatitujuh dan sekitarnya.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal W. Deandels 1808-1811 perlawanan rakyat makin meluas sampai ke daerah Indramayu sebelah selatan, karena Deandels bertindak sewenang-wenang dengan mengurangi kekuasaan sultan. Raja Kanoman pada tanggal 25 Maret 1808 dikembalikan dari pembuangannya di Ambon, kemudian diangkat menjadi Sultan Cirebon. Namun Deandels membagi Cirebon menjadi dua yaitu Cirebon Utara dan Cirebon Selatan yang meliputi Galuh, Limbangan serta Sukapura. Sedangkan Cirebon Utara menjadi tiga kabupaten yaitu: 1) Daerah

Cirebon dan Kuningan dikepalai Sultan Sepuh, 2) daerah Majalengka dikepalai Sultan Anom, 3) daerah Indramayu dikepalai Sultan Cirebon. Satu tahun kemudian daerah Cirebon dijadikan hak milik kekuasaan Belanda. Para Sultan dijadikan pegawai negeri dan mendapat gaji dari pemerintah. Tahun berikutnya 2 Maret 1810 Sultan Cirebon, Raja Kanoman dipecat, karena sikap dan tindakannya selalu menentang pemerintah Belanda. Rakyat marah mereka merasa kehilangan seorang pemimpin yang selama ini dianggap yang membela kepentingan nasib mereka. Akibatnya timbul lagi ketegangan dan kegelisahan, sehingga tindakan perlawanan dari rakyat Cirebon, yang semula dianggap reda, berkobar lagi.

Akibat tindakan Deandels yang keras telah membawa ketegangan dan keresahan di kalangan rakyat Cirebon. Sementara Bagus Rangin melihat situasi yang sudah siap perang segera menghimpun para pengikutnya dan masyarakat juga mengharapkan Bagus Rangin tampil sebagai pemimpin mereka dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Sementara itu gabungan tentara Belanda dibantu para bupati telah bergerak dari kabupaten menuju Jatitujuh. Namun Bagus Rangin berpendapat sebelum pasukan musuh sampai di Jatitujuh, pasukannya harus mengadakan serangan terlebih dahulu, caranya dengan memasang umbul-umbul di lapangan Jawura. Maksud pemasangan tersebut sebagai tanda “menantang perang”. Dipilihnya lapangan Jawura karena letaknya strategis dan sangat menguntungkan. Lapangan Jawura berada sebelah barat Desa Kertajati (5 km dari Jatitujuh), memanjang ke arah timur-barat dengan luas kurang lebih lima hektar. Seluruh pasukan Bagus Rangin ditempatkan di bagian utara, dengan komandan-komandan pasukannya Buyut Merat, Buyut Deisa, Buyut Sena, Buyut Jayakusuma, Buyut Jago, Buyut Teteg, Buyut Huyung, Buyut Bongkok, dan Buyut Jasu.

Sementara pasukan gabungan pemerintah Belanda menurut komisi Thalman tahun 1807 dalam persiapannya menumpas pasukan Bagus Rangin, telah memerintahkan tiap kabupaten di wilayah Priangan dan Kabupaten Karawang mengirimkan pasukannya terutama kabupaten yang berbatasan dengan daerah

perlawanan. Ditetapkan Bupati Sumedang pangeran Kusumahdinata dan Bupati Karawang R.A. Surialaga masing-masing sebagai komandan pasukan. Kedua pasukan itu dibantu pasukan Belanda dari Batavia dipimpin seorang Mayor ditambah dengan para apir. Pasukan gabungan begitu tiba di perbatasan Kertajati dan Babakan melihat umbul-umbul merah yang dipasang pasukan Bagus Rangin. Itu berarti pasukan Belanda harus segera dipencar dan sebagai tanda dimulainya perang dengan diawali dentuman meriam, maka terjadilah pertempuran di Lapangan Jawura.

Selanjutnya pasukan Bagus Rangin pada tanggal 22 Juli 1810 dapat mengalahkan pasukan Sumedang dekat Bantarjati, sedangkan pasukan Buyut Merat dan Buyut Deisa dapat mematahkan pertahanan Karawang. Namun karena jumlah pasukan Belanda lebih banyak dengan persenjataan lengkap akhirnya pasukan Bagus Rangin harus mundur. Demikian pula Jatitujuh diblokade musuh, sehingga pasukan Bagus Rangin ruang geraknya menjadi sempit dan hubungannya terputus. Pasukan Sumedang dapat dikonsolidasi oleh Pangeran Kornel sehingga pasukan Bagus Rangin dapat dipukul mundur sampai ke Desa Panongan. Perlawanan di daerah Cirebon belum selesai, sebab terhalang oleh penggantian pemerintahan Belanda ke tangan Inggris pada tahun 1811. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Bagus Rangin untuk mengadakan konsolidasi dan menghimpun kekuatan pasukannya. Tanggal 9 Januari 1812 Gubernur Jenderal Inggris Raffles memerintahkan Komisaris Couperus yang berkedudukan di Cianjur supaya mengumpulkan 500 orang prajurit dari Cianjur yang dipimpin bupati sendiri untuk dikirimkan ke Karawang. Demikian pula Bupati Karawang R.A. Surialaga menyerahkan pasukannya ke medan perang Bantarjati guna menumpas pasukan Bagus Rangin.

Pertempuran pun terjadi lagi di Bantarjati dari tanggal 16 -29 Februari 1812, dimana pasukan Bagus Rangin dapat dipukul mundur dan menderita kerugian di antaranya 87 orang prajurit tewas, 227 orang serta 2 pemimpinnya ditangkap, 23 pucuk senapan, 19 buah tombak, 27 pedang, 3 buah keris serta payung kebesaran

Bagus Rangin dan perlengkapan wayang dirampas dan 776 orang keluarga besar Bagus Rangin serta keluarga sebagian pasukannya terdiri dari wanita dan anak-anak ditahan (Edi Ekadjati, hlm. 112). Pasukan Pemerintah Belanda mengadakan operasi militer dan terus mencari persembunyian kaum perlawanan dan berhasil menangkap Bagus Rangin di Panongan pada tanggal 27 Juni 1812.

Untuk sementara perlawanan rakyat Cirebon terhadap Belanda terhenti, namun tersebar berita pada tanggal 8 Desember 1816 penduduk Karawang, Ciasem dan Pamanukan yang berjumlah sekitar 2500 orang laki-laki bersenjata lengkap, dipimpin oleh seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Bagus Jabin keponakan Bagus Rangin berusaha mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Mereka berkumpul di kampung Lohbener, pinggir Sungai Cimanuk sebelah barat. Dan bermaksud untuk mengadakan penyerbuan ke Kandanghaur (bekas ibukota Kabupaten Karawang dan Indramayu). Alasan penyerbuan ke Kandanghaur yaitu:

1. Untuk menggulingkan kedudukan kepala daerahnya yang tidak disenangi rakyat, karena perbuatannya selalu menyengsarakan rakyat serta bekerja sama dengan Belanda.
2. Menuntut kepada pemerintah Belanda supaya pajak diperingan dan upeti dihentikan.
3. Menyerang kedudukan Belanda yang ada di daerah itu.

Bagus Jabon beserta pasukannya pada tanggal 9 Desember 1816 melancarkan serangan ke Kandanghaur dan berhasil menduduki kota itu. Sementara Residen Cirebon W.N. Servatius mendengar berita itu dan mengepung kota itu dari segala arah. Sepuluh hari kemudian Belanda mengadakan ultimatum terhadap Bagus Jabon agar segera menyerahkan diri, jika tidak akan ditangkap dengan kekerasan. Karena tidak mengindahkan ultimatum tersebut maka pada 20 Desember 1816 Kandanghaur diserang Belanda dari arah Indramayu, ujung Losarang dan Lohbener Wetan, semua serangan dapat ditahan oleh pasukan Bagus Jabin.

Sementara itu bagus Jabin akan mengadakan serangan ke Indramayu, tiba-tiba secara serentak pasukan Belanda datang

dipimpin sendiri oleh Residen Priangan W.C. Van Hotman datangnya dari arah Subang (Wanayasa) terus ke Lohbener Kulon sampai ke Losarang, mereka dibantu oleh pasukan Belanda dari Kabupaten Sumedang dipimpin Bupati R.A. Aiwijaya. Selain itu Belanda mendatangkan 160 orang tentara dari Jawa Tengah yaitu detasemen Semarang dan pasukan Bengawan Wetan (Solo) dipimpin oleh Bupati R.A. Nitidiningrat.

Pasukan Belanda menjadi kuat karena bantuan datang dari berbagai jurusan dan dalam penyerangannya terhadap pasukan perlawanan Bagus Jabin menghadapi serangan yang hebat, sehingga pertempuran tidak bisa dibendung lagi dan pasukan Bagus Jabin mulai terdesak sampai ke pinggir Sungai Cimanuk. Pasukan yang akan menyebrang sungai ke arah timur dan selatan harus berhadapan dengan pasukan Belanda dari Cirebon. Hanya sekitar 25 orang yang dapat melarikan diri, sedangkan 500 orang ditangkap, 60 orang tewas dalam pertempuran, 100 orang luka berat dan tawanan perang dibawa ke Cianjur untuk diadili. Dari pihak Belanda 4 orang dan 11 orang pribumi yang tewas (Edi Ekadjadi, hlm. 115).

Perlawanan rakyat Cirebon terus berlanjut dalam waktu dua tahun berikutnya tepatnya Januari 1818 mengadakan serangan lagi terhadap Belanda. Dalam peristiwa tersebut Demang Among Pances, Kepala Distrik Blandong dan jurutulisnya terbunuh. Perlawanan terus dilanjutkan ke Palimanan dan berhasil mendobrak penjara di kota dan membebaskan para tawanan yang ada disitu serta menghancurkan jembatan-jembatan yang menuju ke kota. Serangan berikutnya ke Rajagaluh ibukota Kabupaten Majalengka di sana berhasil membakar rumah residen di Rajagaluh dan Prundaut di Banyaran. Mendengar berita itu Asisten Residen Heycenreich dan Bupati Bangsawan Wetan R.A. Nitiningrat dengan 60 orang pasukan berkuda datang, namun dapat disergap oleh pasukan Bagus Serit, akibatnya asisten dan bupati itu tewas.

Residen Priangan Van Motman mendengar peristiwa kerusuhan di Rajagaluh segera datang ke daerah Tomo dan Karangsembung untuk menyelamatkan gudang-gudang kopi dari

serangan kaum perlawanan. Demikian pula atas perintah Gubernur Jendral Belanda segera mengirimkan pasukan secara besar-besaran ke daerah Cirebon, dari Batavia dikirim pasukan infanteri dari resimen 5 batalyon 1 yang berkedudukan di Weltevreden, kompi pribumi dari batalyon 19 infanteri dan 36 orang pasukan artileri berikut dua buah pucuk meriam, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Richemont. Keseluruhan pasukan dan peralatan perang yang dibawa dari Batavia diangkut dengan sebuah kapal pada tanggal 26 Januari 1818 dan tiba di Cirebon dua hari kemudian (Edi Ekadjati, hlm. 117). Sehari sebelumnya yaitu tanggal 25 Januari 1818 kapal meriam nomor 7 dikirim ke Cirebon dipimpin Letnan W.H. Hunther. Dari Semarang satu detasemen serdadu Belanda pimpinan Kapten Couvreur diperbantukan pula ke Cirebon. Pada tanggal 27 Januari 1818 dua pasukan dari Bogor terdiri atas pasukan Benggal dan pasukan berkuda dipimpin Halshuher Van Harloch. Pasukan-pasukan pemerintahan Belanda ditampung di tiga tempat sesuai dengan arah datangnya sebelum diberangkatkan ke medan perang. Ketiga tempat penampungan itu adalah Karangsembung untuk pasukan yang datang dari Priangan dan Bogor, Cirebon untuk pasukan yang datang dari Batavia dan Semarang dan Indramayu bagi pasukan yang telah berada di daerah tersebut. Rencananya serangan akan dilaksanakan tanggal 2 Februari 1818, karena pihak Belanda beranggapan bahwa pasukan perlawanan pimpinan Bagus Jabin dianggap sangat berbahaya.

Sementara pasukan perlawanan meningkatkan penyerbuan ke desa-desa Kedondong, menguasai jalan raya Sumedang – Cirebon sekitar Palimanan, sehingga Residen Priangan Van Motman yang akan menuju ke Cirebon harus menempuh jalan lain dari Karangsembung. Tanggal 1 Februari 1818 pasukan Belanda mulai bergerak dari arah Cirebon menuju Desa Jamblang. Kemudian mengadakan serangan umum ke pusat kaum perlawanan pimpinan Bagus Jabin di Kedondong. Namun tidak jadi karena ada penggantian Komandan Operasi dari Letkol Richendut yang diangkat oleh Panglima Pasukan Belanda. Penggantian itu menimbulkan ketidakpuasan, dan disiplin menurun bagi para serdadu Belanda, seperti yang dilakukan oleh Kapten Mulder,

Letnan Van Steenis, Kapten Van Gent yang diberi tugas mengepung dan menyerang Kedondong diabaikan. Dengan begitu rencana penyerangan mengalami kegagalan, bahkan pasukan Belanda kocar-kacir dan melarikan diri ke Palimanan. Pasukan Bagus Jabin terus mengejar pasukan Belanda. Dalam peristiwa tersebut Letnan Van Hooru, Letnan Wessel dan Kapten Kalberg menjadi korban.

Ketidakberdayaan pasukan Belanda akhirnya dapat ditolong oleh pasukan Benggal dan pasukan berkuda pimpinan Letnan Borneman dan Kapten Elout dan dapat menghentikan pasukan Bagus Jabin dan mundur sampai ke seberang Sungai Karu, anak Sungai Cimanuk. Untuk meningkatkan semangat serdadunya pemerintah Belanda memberi hadiah 500 Sp.M. bagi yang bisa menangkap hidup-hidup pemimpin perlawanan terpenting, 250 Sp.M. yang dapat menyerahkan pemimpin perlawanan, dan 100 Sp.M. bagi siapa saja yang dapat menyerahkan anggota kaum perlawanan (Edi Ekadjati, hlm. 119). Setelah pasukan Belanda pulih kekuatannya maka desa-desa dan jalan-jalan yang semula dikuasai pasukan perlawanan dapat ditertibkan lagi, sehingga tanggal 25 Februari 1818 Nairem dapat ditangkap. Menyusul daerah Rajagaluh, Kedondong dan Palimanan menjadi aman dari gangguan perlawanan. Dan untuk menjaga keamanan daerah itu dibangun markas militer dan ditempatkan pasukan dari Palimanan, Kedondong dan Indramayu.

Perlawanan rakyat Cirebon dianggap sudah selesai, namun perkiraan Belanda itu salah, karena tokoh yang ditakuti Belanda adalah Bagus Serit muncul lagi dengan 50 orang pasukannya langsung menyerang Palimanan. Komplek markas militer yang sedang dibangun dirusak, persediaan pakaian, persenjataan dirampas. Pasukan Belanda mengundurkan diri ke Kali Tanjong. Dan pasukan perlawanan juga mundur begitu tahu Komandan Pasukan Belanda dipimpin Krieger itu sedang membangun kekuatan.

Dengan mengkonsolidasi kekuatan Bagus Serit pernah mengajak ketiga orang Sultan Cirebon dengan mengirim surat melalui kurier untuk bergabung guna membebaskan Cirebon dari

cengkeraman Belanda. Namun Sultan Sepuh menolak, malahan melaporkan kepada Belanda dan menangkap kurir tersebut. Sementara gerakan pasukan Bagus Serit sangat sulit untuk dihadapi, apalagi ditangkap. Maka pemerintah Belanda mengeluarkan pengumuman yang berbunyi; barang siapa yang berhasil menangkap Bagus Serit hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar F.2.200.

Di dekat Desa Sumber pada tanggal 8 Agustus 1818 terjadi lagi pertempuran antara Belanda dan kaum perlawanan dan berhasil menceraiberaikan pasukan Belanda. Namun pasukan Belanda cepat mendapat bantuan dari pasukan Sultan Sepuh, akhirnya dalam kontak senjata tersebut Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh dan atas keberhasilannya Sultan Sepuh mendapat hadiah penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan nasib Bagus Serit dan Nairem berdasar keputusan pengadilan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 31 Oktober 1818. Para pemimpin perlawanan yang lain Sapie, Lejo, dan Ribut dijatuhi hukuman dera, memakai rantai dan dibuang selama 7 tahun, 14 orang pengikut Bagus Serit dihukum kerja paksa seumur hidup di perusahaan negara di Pulau Banda dan 7 orang lainnya dihukum kerja paksa di kebun kopi Banyuwangi. Demikianlah akhir perlawanan rakyat Cirebon terhadap Belanda berlangsung selama 14 tahun.

BAB V

PENUTUP

Pada awal abad ke-20, kita mengetahui mulai munculnya gerakan nasionalis Indonesia, pada saat itu Cirebon pun mengalami pergolakan. Terjadi bentrokan-bentrokan di kota-kota, begitu pula di desa-desa terjadi protes-protes rakyat yang mengambil bagian dari gerakan-gerakan nasionalisme abad ke-20. Beberapa orang Cirebon menjadi pemimpin pergerakan seperti yang dapat kita saksikan pada daftar orang-orang yang diasingkan atau dibuang setelah terjadinya pemberontakan pada tahun 1926 sampai 1927. Beberapa di antara aktivis terkemuka dari penduduk Cirebon diasingkan oleh Belanda setelah pergolakan-pergolakan terjadi. Meskipun dilakukan pembuangan, namun aktivitas para pejuang di seluruh residensial Cirebon tetap membara baik pada akhir tahun 1920-an sampai permulaan tahun 1930-an. Pada masa itu partai-partai nasionalis yang telah berakar di daerah-daerah pedesaan, seperti di Indramayu, tetap meneruskan tradisi perjuangan yang ada pada akhir abad ke-19 dalam hal militansi dan protes.

Selama berlangsungnya Perang Dunia kedua sewaktu Hindia Belanda terlibat dalam perang dengan Jepang setelah tanggal 8 Desember 1941, Pantai Cirebon di Eretan dekat Indramayu

menjadi sasaran penyerbuan Jepang. Tentara Jepang mendarat di Indramayu terus menduduki Cirebon tanpa terlalu banyak mengalami tantangan, sebagaimana halnya dengan di daerah lainnya di Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pada masa itu, Jepang disambut oleh orang Indonesia sebagai pembebas dari penindasan Belanda. Namun pandangan ini hanya sesaat karena ternyata kemudian adalah bahwa tentara Jepang lebih kejam dari tentara Belanda. Kekalahan Belanda dari Jepang merupakan kekalahan pahit dan sekaligus sebagai ongkos yang harus dibayar atas penindasan yang dilakukan selama bertahun-tahun di Indonesia.

Pada Juni 1944, di Desa Kamplongan dan sekitarnya di Indramayu, terjadi pemberontakan kaum petani yang dipimpin oleh Soekanda. Pemberontakan ini terjadi karena dipicu oleh protes petani atas pembelian padi secara paksa dengan harga yang tak masuk akal karena begitu murah. Empat bulan sebelumnya yaitu sekitar Februari 1944 pemberontakan yang diakibatkan oleh hal yang sama juga terjadi di Singaparna. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa dan berhasil diredam oleh Jepang pada 8 Februari 1944.

Cirebon merupakan daerah ramai dan revolusioner selama hari-hari permulaan revolusi Indonesia, hal ini sesuai dengan tradisi Cirebon mengenai pergolakan politik dan sosial. Linggarjati merupakan tempat persetujuan internasional besar yang pertama bagi Republik Indonesia yang baru merdeka. Persetujuan Linggarjati pada tahun 1946 yang terkenal itu diadakan antara orang-orang Indonesia dan Belanda. Persetujuan ini seharusnya membawa perdamaian antara kekuasaan kolonial yang lama dengan Republik Indonesia. Namun sayang sekali masih berlangsung empat tahun peperangan untuk mengakhiri perjuangan revolusioner.

Peranan Cirebon dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bagi sebuah bangsa baru, bangsa Indonesia, satu di antaranya adalah ketika menjelang Konferensi Linggarjati. AB Lapijan

menceritakan penggalan-penggalan peristiwa ketika itu sebagai berikut :

“Sebelum delegasi Belanda tiba di Linggarjati, telah terjadi sebuah insiden di pelabuhan Cirebon yang menunjukkan perubahan sikap Belanda yang kini agaknya lebih akomodatif. Sambil menunggu di kapal pemburu torpedo, HM Banckert yang sedang berlabuh di luar pelabuhan, kapal RI Gajah Mada dengan bendera Merah Putih mendekati kapal perang Belanda dengan maksud menjemput delegasi ke darat. Akan tetapi angkatan laut Belanda bersikeras untuk mengantarkan sendiri delegasinya sehingga terjadi pertengkaran yang hampir saja menggagalkan pelaksanaan perundingan Linggarjati. Baru sesudah beberapa “manuver yang tidak dapat dimengerti” (menurut catatan Prof. Ir. Schermerhorn) tercapailah kompromi sehingga kapal republik dengan membawa dua orang Belanda, memasuki pelabuhan Cirebon, diikuti kapal patroli Belanda yang mengangkut delegasinya yang kemudian disambut oleh pembesar Indonesia di pelabuhan. Insiden ini bukan hanya suatu soal protokol yang kecil, tetapi mengandung pengakuan dalam perairan teritorial Indonesia yang dirasakan sebagai suatu penghinaan pahit terhadap Angkatan Laut Belanda. Ratu Wilhelmina sangat gusar...”

Di permulaan abad ke-20, Cirebon menempati posisi sebagai pelabuhan ekspor—impor ke-4 di Pulau Jawa setelah Batavia, Surabaya dan Semarang. Posisi ini semakin memotivasi pihak pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan berbagai pembenahan terhadap pelabuhan dan kota Cirebon. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya kepentingan Belanda baik pada pihak pemerintah kolonial Belanda maupun di pihak swasta di pedalaman. Dari sudut ini pelabuhan Cirebon dan kota Cirebon menjadi strategis bukan hanya dari sudut transit komoditi ekspor-impor, tetapi lebih dari itu juga sebagai pusat pengendalian politik keamanan pedalaman yang memperlihatkan adanya gejala pergolakan politik menentang kolonialisme Belanda.

Dari berbagai perkembangan keadaan tersebut, pada tahun 1906 Kota Cirebon ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi kotamadia atau *gemeente* dengan nama *Gemeente Cheribon*. Pertimbangan utama agar sebuah kota menjadi gemeente atau kotamadia adalah pada besarnya kepentingan pemerintah kolonial Belanda di kota-kota tersebut. Dapat diperkirakan bahwa di mata pemerintah Belanda Cirebon menempati posisi penting dan strategis dalam mempertahankan kedudukannya di Indonesia.

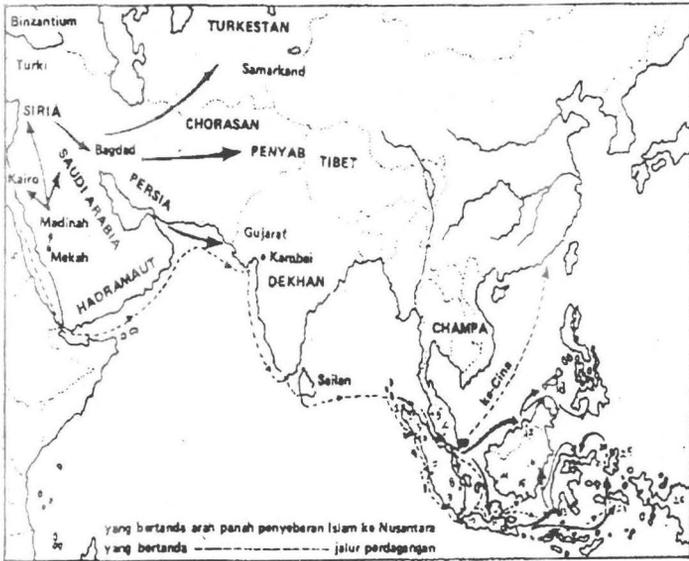
DAFTAR PUSTAKA

- Baidlowi Syamsuri. **Kisah Walisongo: Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa**. Apollo, Surabaya, 1935.
- Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra** – Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1996, 1997.
- Drs. Adeng dkk, **Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra**, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta; 1998.
- Dartono, **Penyebaran Agama Islam di Cirebon**, Skripsi S1 UI, 1991.
- Edi Ekadjati, dkk. **Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1990, hlm. 99.
- Hasan Basyari. **Sekitar Kompleks Makam Sunan Gunung Jati dan Sekitar Riwayatnya**, tt.

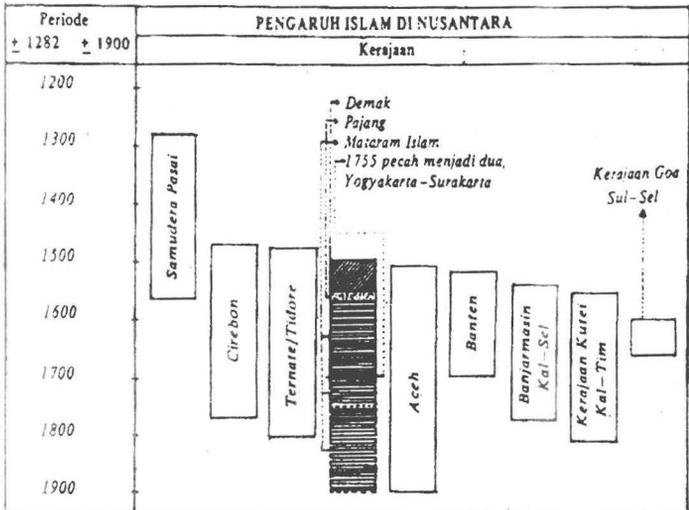
- Kosoh, dkk. **Sejarah Daerah Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek IDSN, Jakarta, 1994, hlm. 138.
- Kartodirdjo, Sartono. **Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900**. dari Emporium sampai Imperium, Jilid I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 235.
- M. Junus Melalatoa, **Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia**, Jilid A - K, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1995.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. **Sejarah Nasional Indonesia III**. Depdikbud, 1982.
- PS Sulendraningrat. **Sejarah Cirebon**. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Tim Aspek Sejarah. **Mengungkap Tokoh Sunan Gunung Jati**. BKSNT, Bandung, 1999.
- Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, **Cerbon**, Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
- Uka Tjandrasasmita. **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari Abad XIII sampai XVIII Masehi**. Menara Kudus, Kudus, 1999.
- Y. Achadiati. S, Iskandar P. Nugroho, **Seri Penerbitan Sejarah Peradaban Manusia Zaman Cirebon**, Multiguna CV, Jakarta, 1990.

Lampiran

PETA PENYEBARAN ISLAM KE NUSANTARA



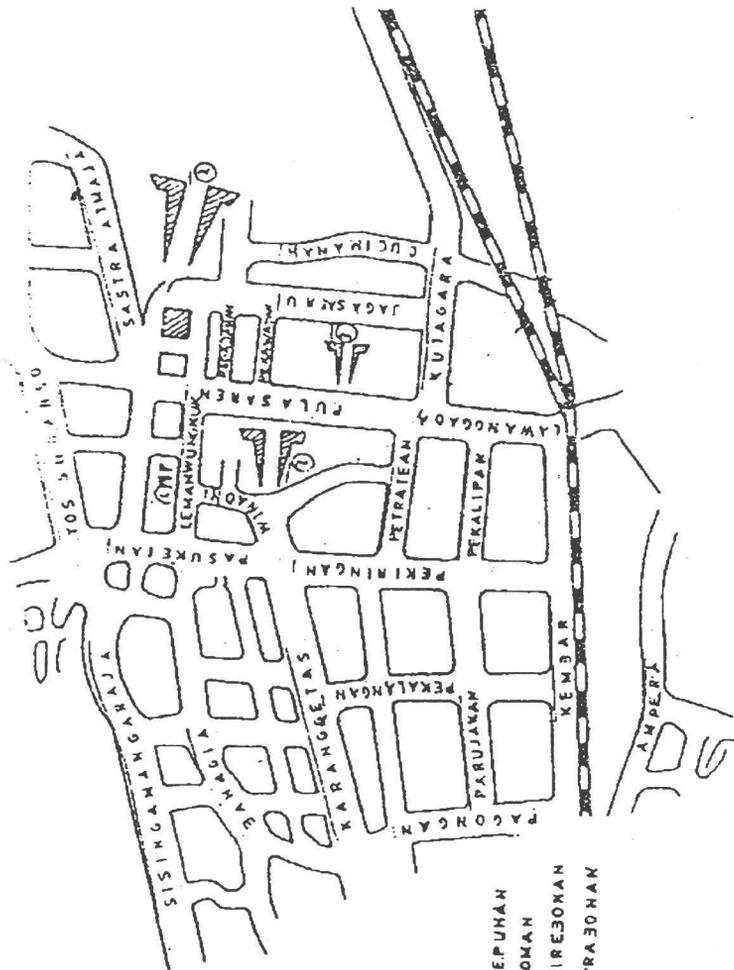
- 1 Aceh
- 2 Samudera Pasai
- 3 Kedah
- 4 Malaka
- 5 Singkil
- 6 Barus
- 7 Pariaman
- 8 Palembang
- 9 Bengkulu
- 10 Banten
- 11 Demak
- 12 Gwi
- 13 Goa
- 14 Tanjungpura
- 15 Banjar
- 16 Kutai
- 17 Brunai
- 18 Sulu
- 19 Mindanau
(orang morol)
- 20 Ternate
- 21 Tidore
- 22 Gorontalo
- 23 Hitu
- 24 Dompu
- 25 Jaitolo
- 26 Irian
- 27 Bintan



Kotamadya
Cerebon



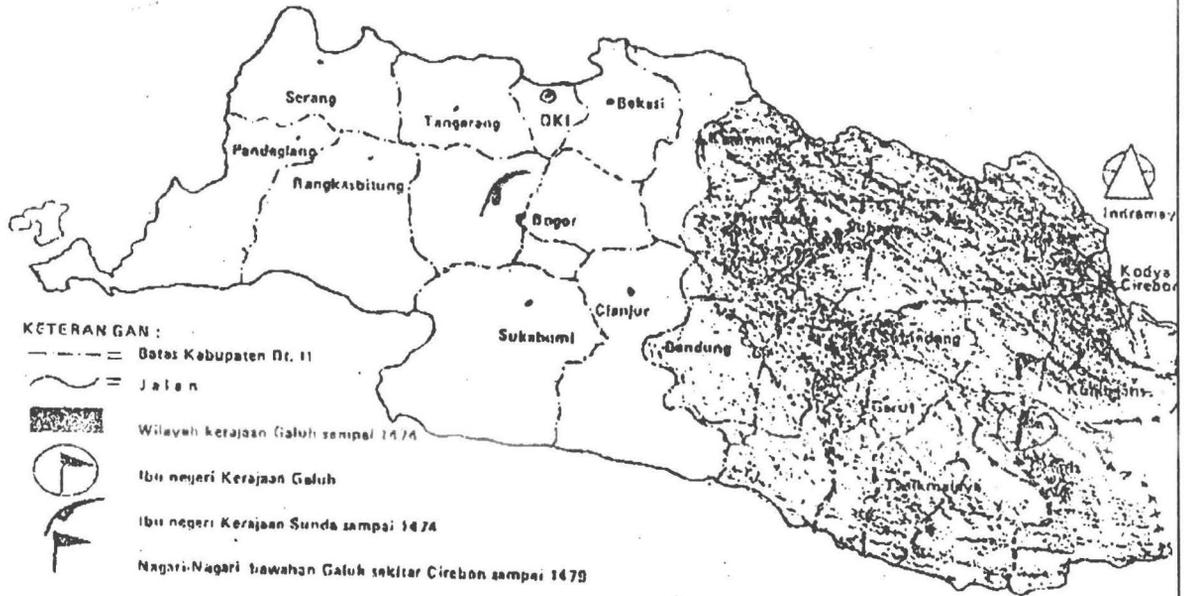
Peta 1 Lokasi Kraton-kraton di Cerebon



PETERANGAN :

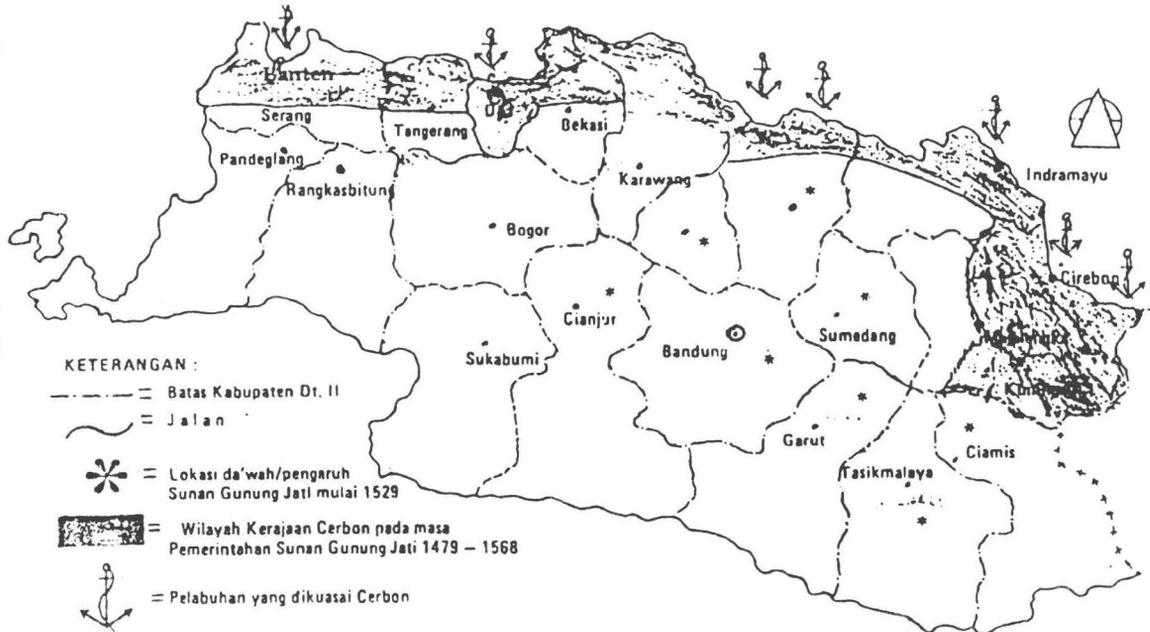
- ① KERATON KASEPUHAN
- ② KERATON KANOMAN
- ③ KERATON KACIRESONAN
- ④ KERATON KAPRAEONAN

Peta 2 Wilayah Kerajaan Galuh Sampai 1474



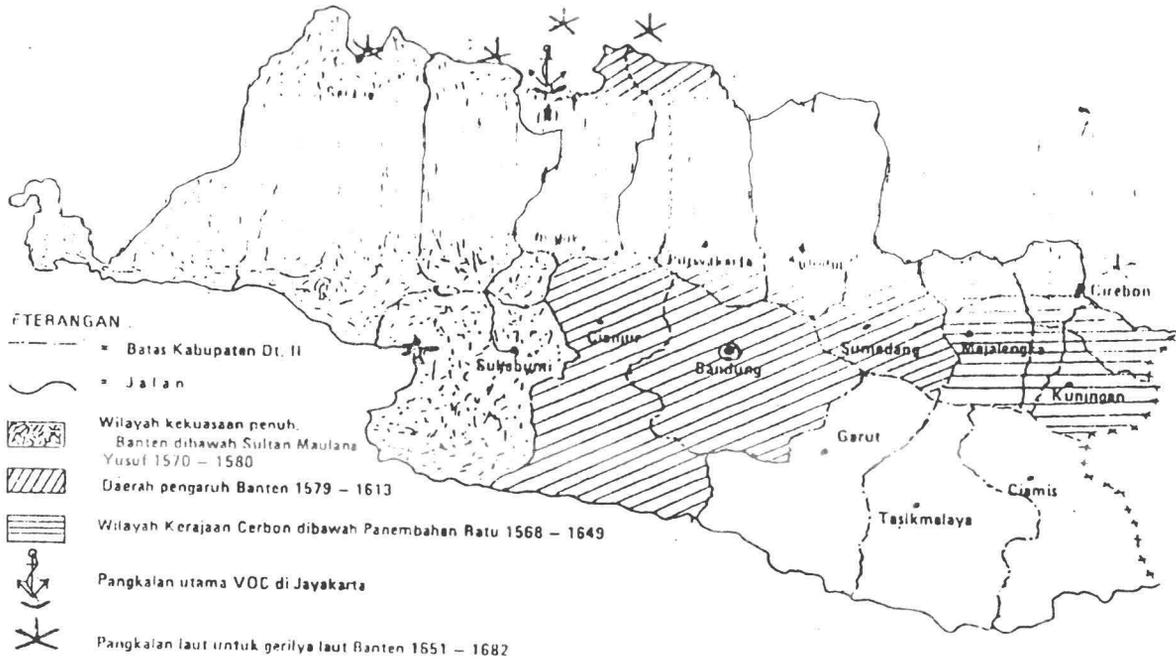
Sumber : Sunardjo t.t, hl. 166

Peta 3 wilayah Kerajaan Cirebon Pada Masa Sunan Gunung Jati 1479-1568



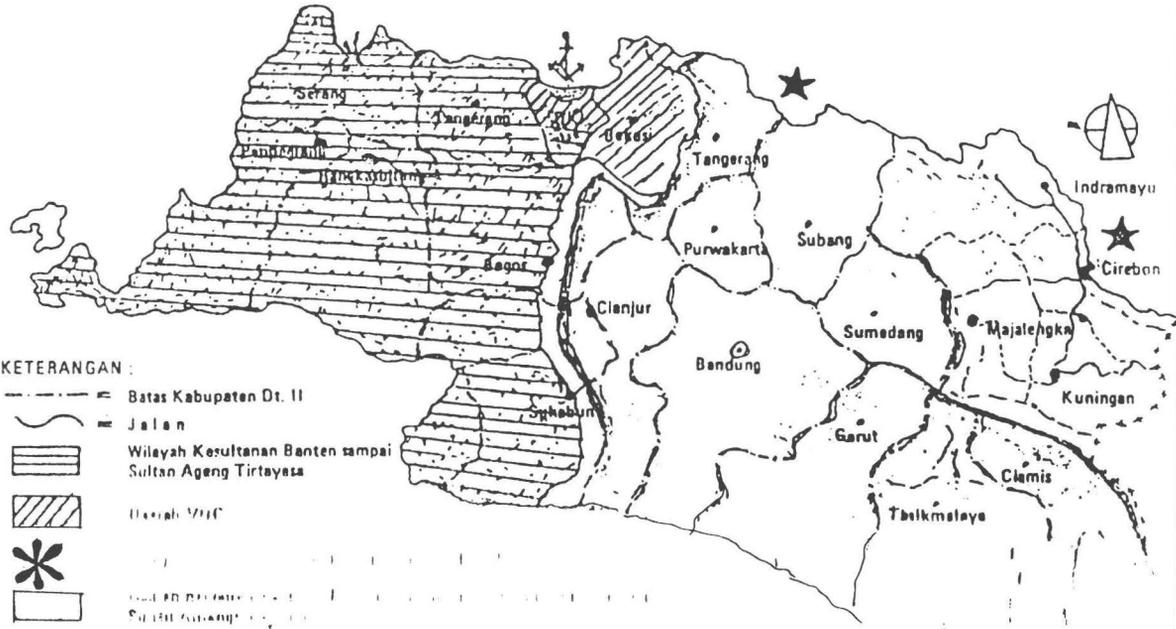
Sumber : Sunardjo, t.t, hl. 167

Peta 4 Wilayah Kerajaan Cirebon di Bawah Penembahan Ratu 1568-1649



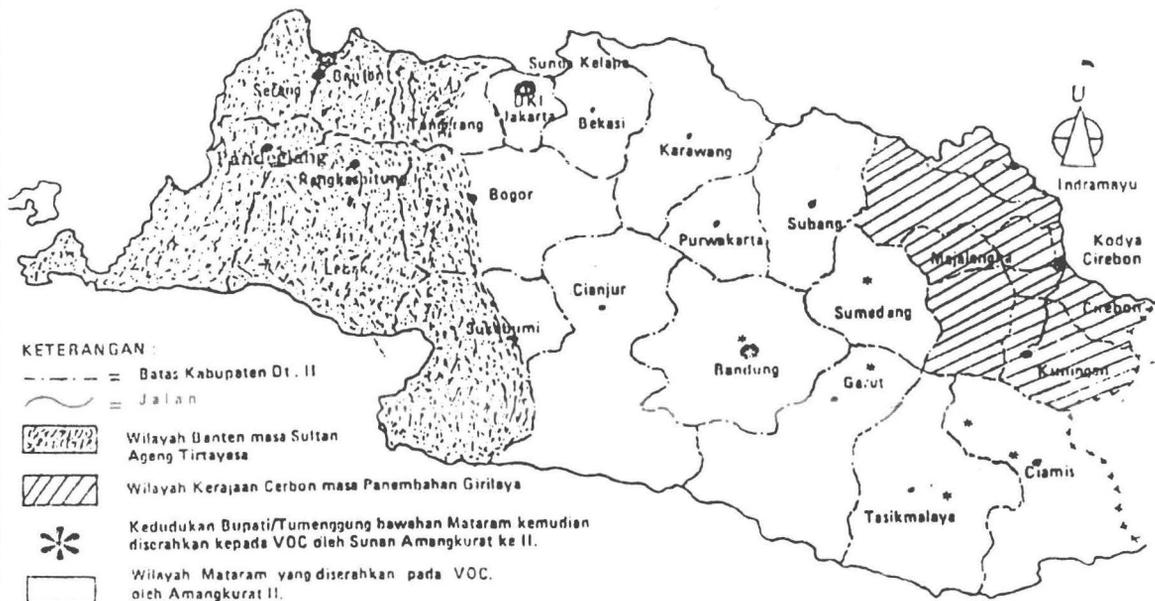
Sumber : Sunardjo t.t.

Peta 5 Wilayah Kerajaan Cirebon di Bawah Panembahan Ratu



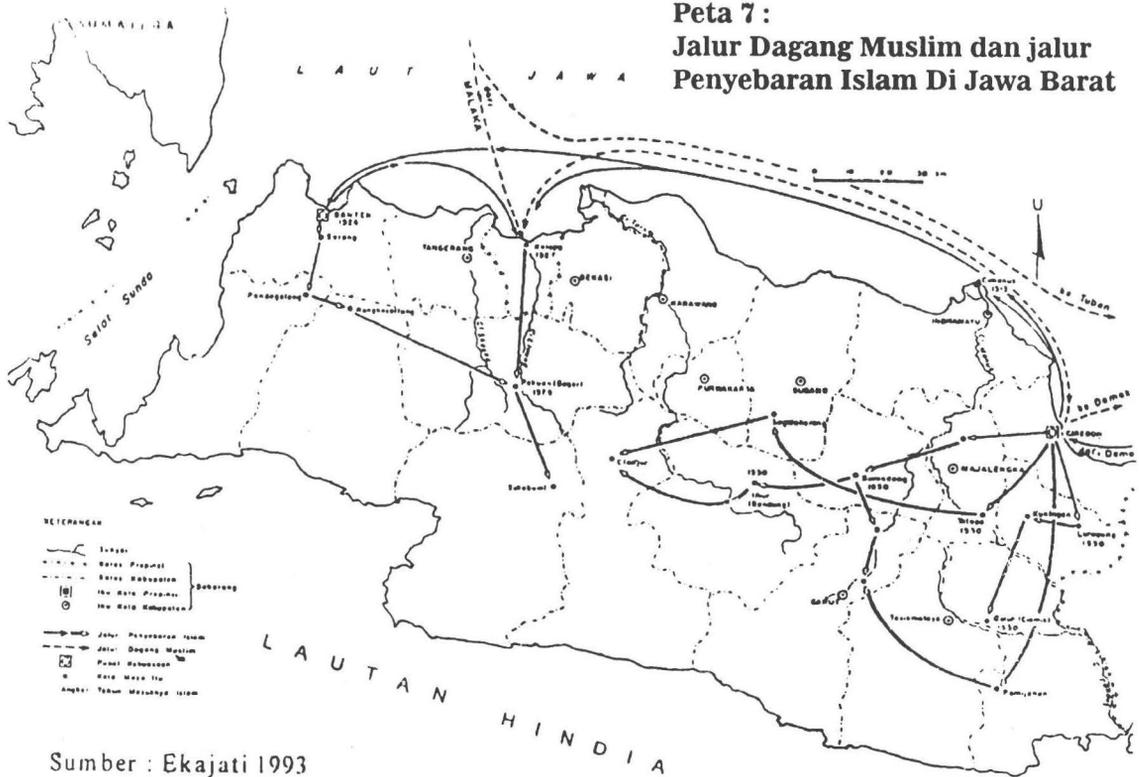
Sumber : Sunardjo, t.t.

Peta 6 Wilayah Kerajaan Cirebon Masa Panembahan Gerilya



Sumber : Sunaedjo, L.L.

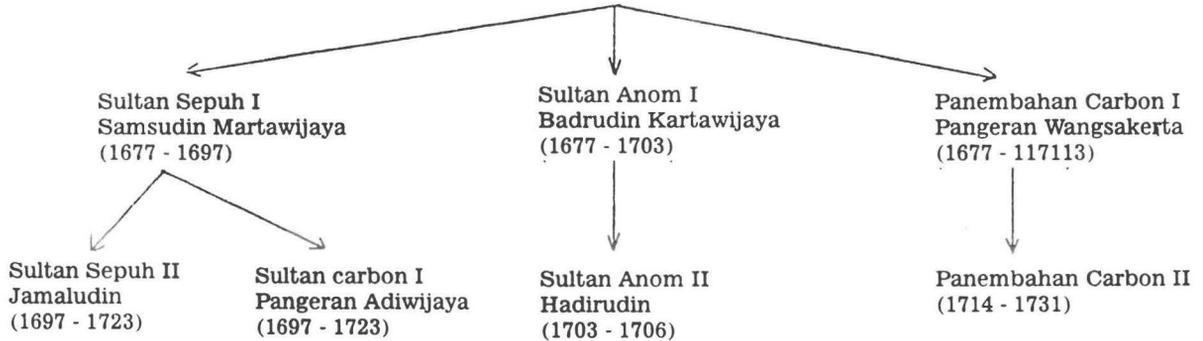
Peta 7 :
Jalur Dagang Muslim dan jalur
Penyebaran Islam Di Jawa Barat



Sumber : Ekajati 1993

DAFTAR RAJA/SULTAN CIREBON SAMPAI ABAD KE-17

1. Susuhunan Jati (1479 - 1568)*
2. Fatahillah (1568 - 1570)+
3. Panembahan Ratu I (1570 - 1647)
4. Panembahan Ratu II (1650 - 1662)

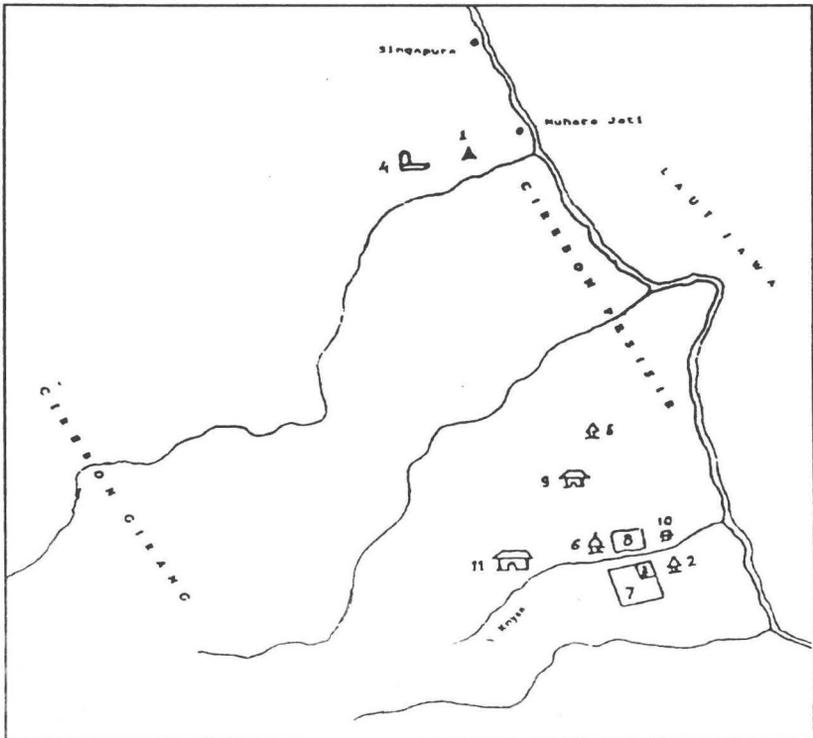


* Pangeran Pasarean mewakili Susuhunan Jati memerintah Cirebon periode 1528 - 1552

+ Fatahillah mewakili susuhunan Jati memerintah Cirebon periode 1552 - 1568

Sumber : Ekajati, 1992, h. 240

Peta 8 Lokasi Kesejarahan Cirebon Sampai Abad ke-17

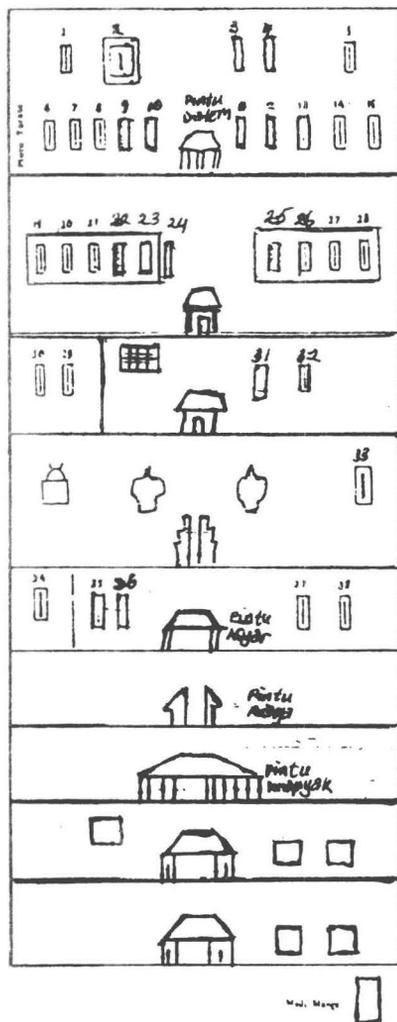


Keterangan :

1. Bukit Ambaran Jati
2. tajug Jalagrahan
3. Keraton Pakungwati
4. Makam Gunung Jati
5. Masjid Panjunan
6. Masjis Agung Sang Ciptarasa
7. Keraton Kesepuhan
8. Alun-alun
9. Keraton Kanoman
10. Lokasi Rumah Pangeran Wangsakerta
11. Keraton Kecirebonan

Sumber : Ekajati 1992

Peta 9 KOMPLEKS MAKAM GUNUNG JATI
(Menurut Naskah Abad ke-19)



Keterangan :

1. Susuhunan Jati
2. Gedeng Tepas
3. Gedeng Ratu bagus Pase
4. Ratu Mas Dalem
5. Gedung Sembung/Gedeng Sempang
6. Ratu Wanawati
7. Pangeran Carbon
8. Pangeran Jakalan
9. Pangeran Pasarean
10. Ratu Nyawa
11. Ratu Ayu
12. Ratu Agung
13. Pangeran Pekik
14. Ratu Raja Agung
15. Pangeran Lampar
16. pangeran Wadal Ludin (?)
17. Pangeran Pajabungan
18. Puteri Cina
19. Pangeran Wirasuta
20. Garwa
21. Ratu Sapajang (Putri Sultan Panjang)
22. Panembahan Ratu
23. Pengeran Wutucukay
24. Patih Keling
25. Pangeran Damis
26. Ratu Jagasatru
27. Pangeran Demang
28. Pangeran Seda Garuda
29. Sultan Gusti
30. Garwa
31. Sultan Sepuh Jamaludin
32. Pengeran Arya Carbon
33. Gedeng Malikata/Penembahan Anom
34. Sultan Kalirudin
35. sultan Alimudin
36. Sultan Kasidin
37. Sultan Martawijaya
38. Sultan Adiwijaya

Catatan : menurut CPCN Pangeran Wangsakerta dikuburkan dekat makam sultan Alimudin

Sambar : Ekajati 1992 h

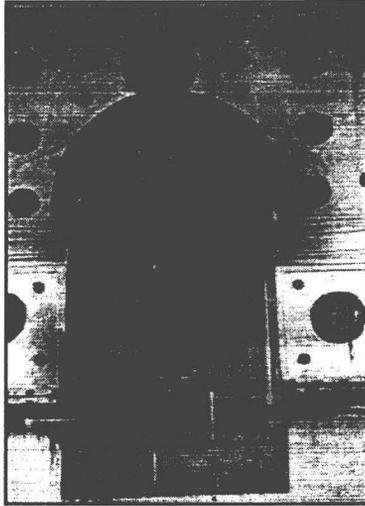


Foto 1 Pintu masuk makam Sunan Gunung Jati

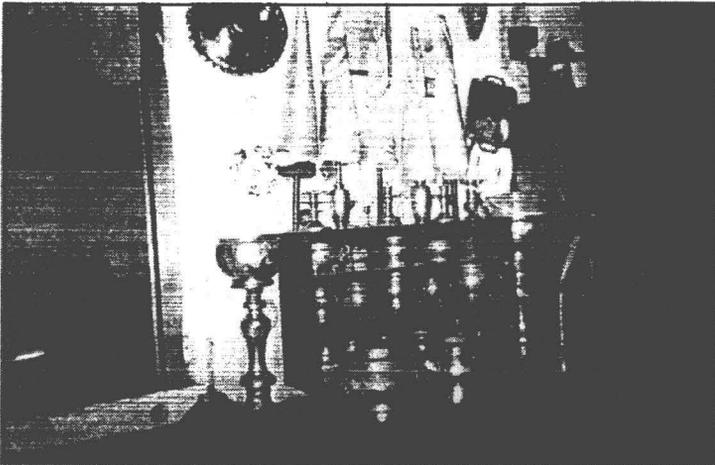
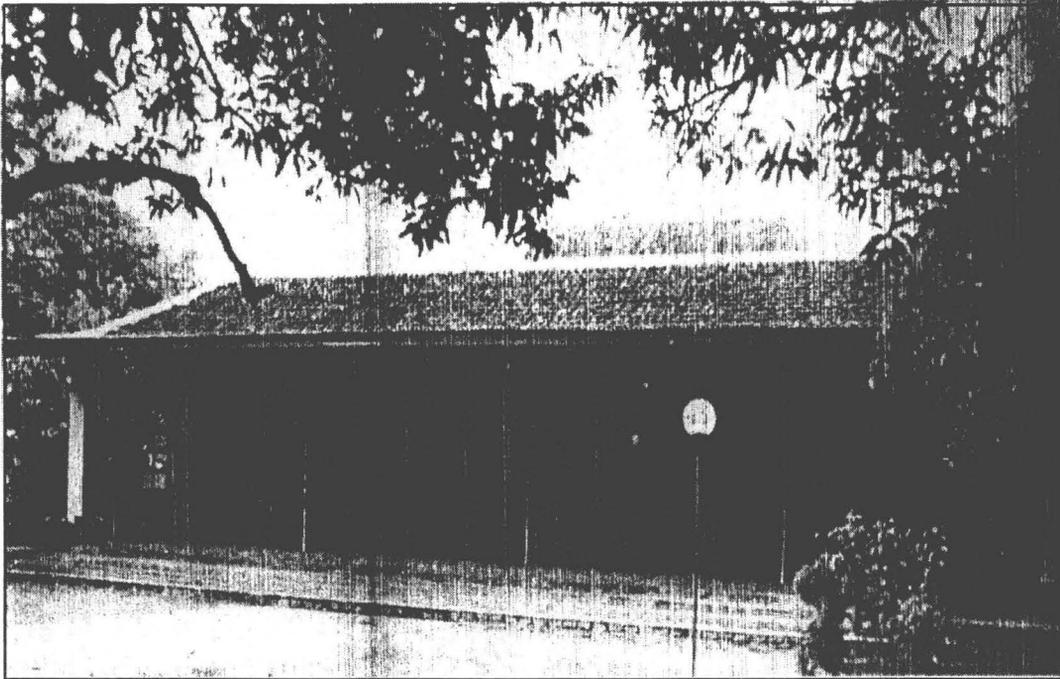


Foto 2 Tanda-tanda kebesaran di makam Sunan Gunung Jati

Foto 3 KERATON KACIREBONAN



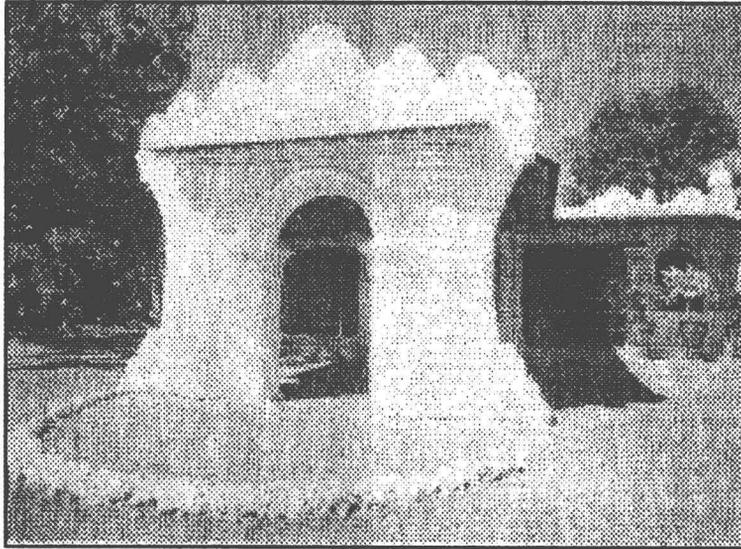
Lokasi

Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Deskripsi Bangunan

Denah Keraton Kacirebonan memanjang arah utara - selatan dan menghadap ke utara. Keraaton terdiri dari Bangunan Induk, Paseban, Langgar, Gedong Ijo, Pringgowati, dan Kaputeran

Foto 4 **KERATON KASEPUHAN**



Lokasi

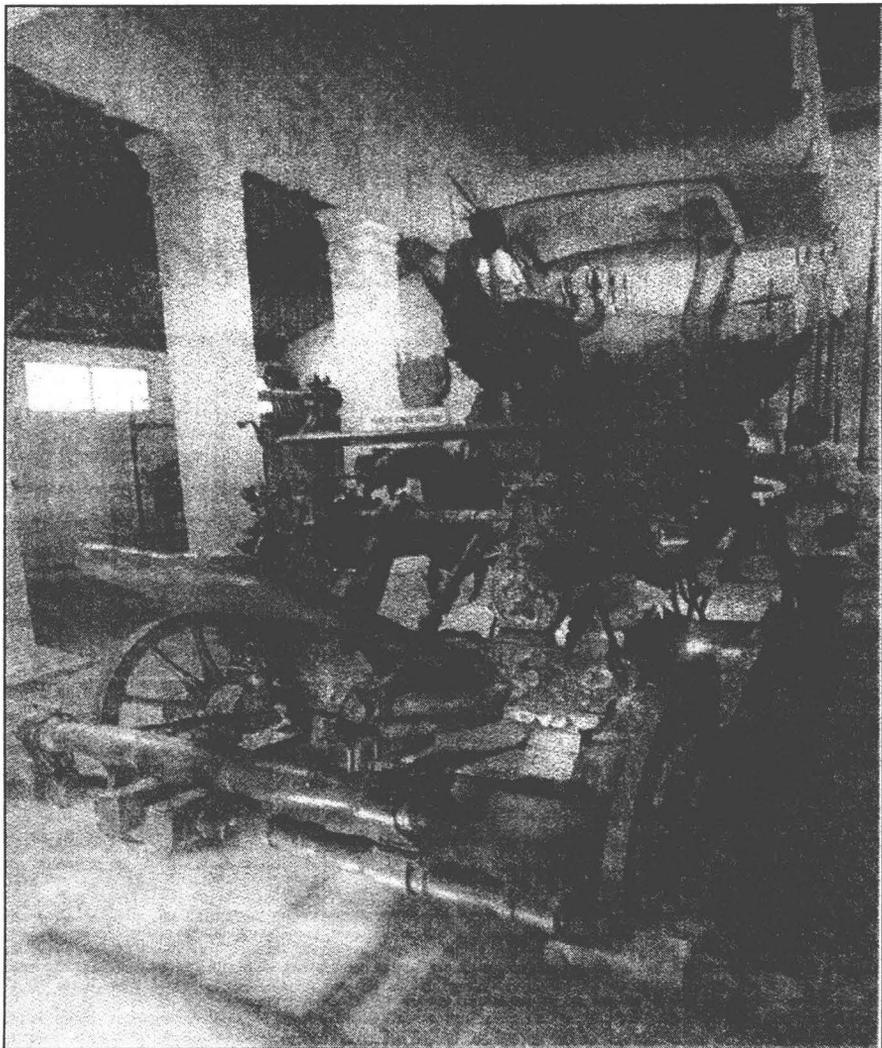
Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wunguk, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

Deskripsi Bangunan

Keraton Kasepuhan merupakan keraton tertua di Cirebon. Penduduk menyebutkan bahwa keraton Kasepuhan merupakan perkembangan Keraton Pakungwati. Pintu utama terletak di sebelah utara dan selatan kompleks. Gerbang utara disebut Kreteg Pangrawit berupa jembatan, sedangkan di sebelah selatan disebut lawang sanga (pintu sembilan)

Pada halaman depan keraton terdapat dua patung singa putih. Di sebelah utara patung Nandi dan di selatan ada bundaran yang dikelilingi pot-pot bunga serta di tengahnya terdapat tugu. Keraton Kasepuhan ini antara lain terdiri dari bangunan induk, Pancaratna, Pancaniti, Sitinggil, Paseban Pengada, Langgar Agung, dan Sri Manganti

Foto 5 SINGA BARONG



Kereta Singa Barong adalah kendaraan khas Keraton Cirebon yang dulu digunakan oleh raja untuk menyebarkan agama Islam. Kereta Singa Barong termasuk unik, karena dari ornamen yang menghiasinya tampak pengaruh Hindu, Cina, dan Islam



Foto 6 Pintu gerbang bagian dalam Keraton Kanoman diperkirakan dahulu tempat tinggalnya Penembahan Anom



Foto 7 Masjid Agung "Cipta Rasa" Cirebon

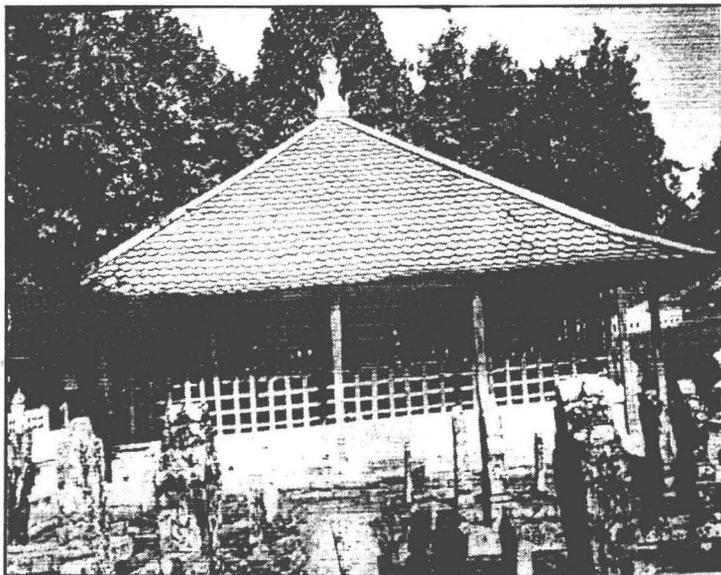


Foto 8 Mande Pajajaran di Komplek makam Sunan Gunung Jati



Foto 9 Bangunan dari Batu-bata di kompleks taman, terletak di bagian belakang Kraton Kasepuhan.
Foto : Enong Ismail

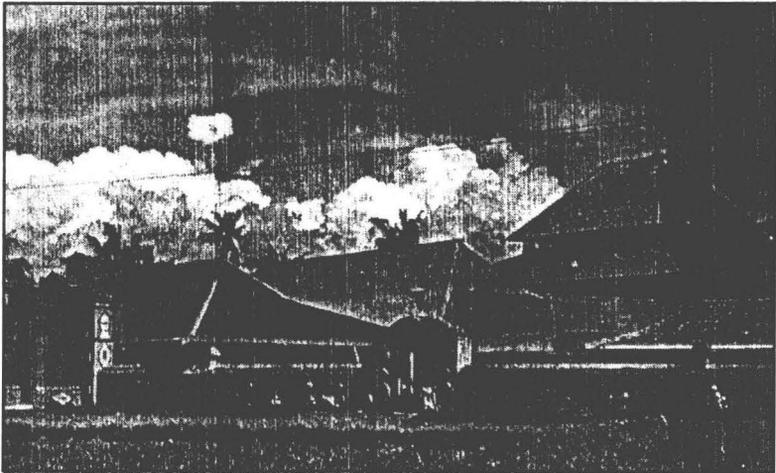


Foto 10 Masjid Agung Kraton Kasepuhan

